

LAPORAN PENELITIAN
HIBAH KOMPETISI BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI (BOPT) 2013



JUDUL PENELITIAN

**PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
YANG LEBIH MENGEDEPANKAN PELIBATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
UNTUK IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
DI BENGKULU**

TIM PENELITI

**Manap, NIDN 0020055914
Rohiat, NIDN 0021055005
Asrori, NIDN 0010105004
Sumarsih, NIDN 0026056010**

**Bidang Kajian : Manajemen Pendidikan/
Kebijakan Pendidikan**

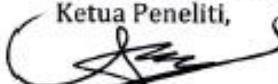
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU
2013**

HALAMAN PENGESAHAN
Hibah Penelitian Unggulan Unib BOPT 2013

1. Judul Penelitian	: Pengembangan Model Manajemen Berbasis Sekolah Yang Lebih Mengedepankan Pelibatan Partisipasi Masyarakat Guna Implementasi Kurikulum 2013 di Bengkulu
2. Research Group/Fokus	: Manajemen Pendidikan/Kajian Kebijakan
3. Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Drs. MANAP, M.Pd.
b. NIP	: 195905201986031001
c. NIDN	: 0020055914
d. Pangkat/Golongan	: Pembina, IV/A
e. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
f. Fakultas/Jurusan	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Ilmu Pendidikan
g. Pusat Penelitian	: Universitas Bengkulu
h. Alamat Institusi	: Jalan W.R. Supratman, Bengkulu, 38371.A
i. Telp/Faks	: (0736) 21170 / (0736)342584
j. Telp/HP/E-mail/E-mail	: 0736-26469 / 0811733454 / msomantri@yahoo.com
4. Anggota Peneliti	
Nama Anggota 1	: Prof. Dr. Rohiat, M.Pd.
NIDN	: 0021055005
Bidang Keahlian	: Manajemen Pendidikan
Nama Anggota 2	: Drs. Asrori, M.Pd.
NIDN	: 0010105004
Bidang Keahlian	: Manajemen Pendidikan
Nama Anggota 3	: Dra. Sumarsih, M.Pd.
NIDN	: 0026056010
Bidang Keahlian	: Manajemen Pendidikan
5. Pembiayaan	
Biaya yang diusulkan tahun 2013	Rp. 80.000.000,-
Biaya yang disetujui reviewer	Rp. 65.000.000,-
Total Biaya yang diusulkan	Rp.180.000.000,-



Prof. Rambat Nursasongko, M.Pd.
NIP. 196112071986 011001

Bengkulu, November 2013
Ketua Peneliti,

Drs. Manap, M.Pd.
NIP. 195905201986031001



Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum.
NIP. 195811121986031002

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen berbasis sekolah yang lebih mengedepankan pelibatan partisipasi masyarakat dalam rangka implementasi kurikulum 2013 di Bengkulu. Penelitian tahun-1 ditujukan untuk **mendeskripsikan** faktor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang potensial berkontribusi terhadap pelaksanaan program sekolah. Berdasarkan data ekonomi, sosial, dan budaya tersebut maka pada tahun ke-2 peneliti akan memberikan penguatan pelibatan partisipasi masyarakat guna memberikan dukungan terhadap implementasi program sekolah, mengajak masyarakat untuk mengidentifikasi apa yang dapat mereka sumbangkan untuk kepentingan pendidikan di sekolah, dan sekolah menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut antara lain dengan jalan: (1) menetapkan sekolah yang relevan dengan masalah dan bersedia menjadi subjek penelitian; (2) mengidentifikasi faktor ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang berpeluang memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program sekolah; dan (3) memberikan penguatan terhadap komite sekolah agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat guna mendukung implementasi kurikulum 2013.

Luaran penelitian tahun-1 antara lain berupa: (1) tersusun instrumen identifikasi potensi sekolah dan faktor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang potensial memberikan kontribusi pada pelaksanaan program sekolah; (2) deskripsi potensi sekolah yang dapat digunakan sebagai media pelibatan partisipasi masyarakat; (3) deskripsi faktor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang potensial memberikan kontribusi pada pelaksanaan program sekolah; dan (4) tersusun **standar prosedur pelibatan partisipasi masyarakat** dalam implementasi program sekolah. Semua hasil tersebut disajikan dalam (A) Laporan Penelitian; (B) Poster; (C) Makalah Seminar Internasional; (D) Proposal Penelitian Tahun-2.

Kata Kunci :

1. Manajemen Berbasis Sekolah,
2. Pelibatan Partisipasi Masyarakat,
3. Implementasi Kurikulum 2013.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyusun laporan akhir penelitian ini. Peneliti menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sepantasnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian dan penyelesaian laporan penelitian ini. Secara khusus penghargaan dan terima kasih kami haturkan kepada:

1. Pimpinan dan staf Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu yang telah memfasilitasi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.
2. Pimpinan dan staf Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, yang telah memberi kesempatan kepada peneliti, untuk berdiskusi dengan perwakilan kepala sekolah dalam kerangka penguatan manajemen berbasis sekolah (MBS) bagi kepala sekolah se Provinsi Bengkulu, peneliti terlibat menjadi nara sumber pada kegiatan tersebut.
3. Kepala sekolah, komite sekolah, orang tua/wali siawa, dan perwakilan siswa yang telah bersedia memberikan informasi dan mendukung terlaksananya penelitian ini.

Kami menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna, banyak hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan laporan penelitian ini. Selanjutnya, pada tahun kedua, akan dilaksa-nakan penguatan partisipasi masyarakat dengan model yang dihasilkan.

Bengkulu, ... November 2013
Peneliti,

Dr. Manap, M.Pd.
NIP. 195905201986031001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang ..	1
B. Tujuan Penelitian	2
C. Luaran Penelitian Tahun-1 ..	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
A. Manajemen Sekolah Dalam Konteks Otonomi Daerah	3
B. Manajemen Berbasis Sekolah	4
C. Pelibatan Patisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sekolah	5
D. Misi Perubahan Kurikulum 2013	6
E. Pemberdayaan Masyarakat	7
F. Paradigma Penelitian	8
BAB 3. METODE PENELITIAN	9
A. Pendekatan Penelitian	9
B. Rancangan Penelitian	9
C. Subjek Penelitian dan Pengembangan	10
D. Data Penelitian, Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan Data	11
E. Indikator Pencapaian	11
F. Pelaksanaan Forum Focus Group Discussion	12
G. Kisi-kisi Instrumen Penggalian Data	13

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	17
A. Hasil Penelitian	17
B. Pembahasan Hasil Penelitian	52
BAB 5. PENGUATAN KAPASITAS KOMITE SEKOLAH	63
(Proposal Penelitian Tahun-2)	
A. Rasional	63
B. Hasil Penelitian Terdahulu	63
C. Pendekatan Penelitian	64
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

**PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
YANG LEBIH MENGEDEPANKAN PELIBATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
UNTUK IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI BENGKULU**

Oleh : Manap, Rohiat, Asrosi, Sumarsih

**BAB 1
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kurikulum 2013 membawa harapan baru untuk menghadirkan proses dan hasil pendidikan yang lebih membumi, dimana peserta tidak tercerabut dari akar budaya masyarakatnya, bahkan didorong untuk menjadi ocial ent pendukung percepatan pembangunan bagi masyarakatnya. Kondisi ini hanya mungkin terjadi manakala proses pendidikan di sekolah mendapat dukungan penuh dari masyarakat di sekitar sekolah. Sebagaimana dikemukakan Sallis bahwa 38% keberhasilan sekolah dipengaruhi oleh kontribusi partisipasi masyarakat pendukungnya (Sallis Joan, 2008; 24). Depdiknas menyatakan bahwa sekolah yang digerakkan dengan partisipasi masyarakat jauh lebih produktif dan berkualitas dibandingkan dengan sekolah yang dikelola tanpa pelibatan partisipasi masyarakat (Laporan Konsultan; *Basic Education Project*; 2005-2006). Oleh sebab itu, para pihak yang terkait mesti menata kembali model penguatan partisipasi masyarakat bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Secara umum masyarakat Bengkulu terdiri dari masyarakat agraris bercorak perkebunan dan pesisir, sebagian besar area pertanian sebelah timur berupa lembah dan bukit, sisi barat pegunungan bukit barisan yang membentang hingga pantai sebelah barat Provinsi Bengkulu. Lingkungan agraris tersebut mewarnai tata ekonomi, ocial, dan budaya yang berbeda-beda karakteristiknya, sehingga kajian dalam rangka pelibatan partisipasi masyarakat perlu dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran berupa **model manajemen berbasis sekolah yang lebih mengedepankan pelibatan partisipasi masyarakat guna mendukung implementasi kurikulum 2013 di Bengkulu**.

Permasalahan yang diteliti terkait pengembangan model manajemen berbasis sekolah yang lebih memprioritaskan pelibatan partisipasi masyarakat untuk mendukung implementasi kurikulum 2013 di Bengkulu, sub masalahnya antara lain meliputi: (1) Bagaimanakah potensi ocial, ekonomi, dan budaya masyarakat pekebun dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat; (2) Bagaimanakah potensi sekolah yang dapat digunakan untuk penguatan pelibatan partisipasi masyarakat pekebun; dan (3) Bagaimanakah standar prosedur penguatan pelibatan partisipasi masyarakat (**SP4M**) dalam mengimplementasikan program sekolah.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen berbasis sekolah yang memprioritaskan pelibatan partisipasi masyarakat pekebun guna implementasi kurikulum 2013 di Bengkulu. Penelitian tahun pertama bertujuan untuk: (1) mengembangkan instrumen potensi sekolah dan ocial ocial, ekonomi, dan budaya masyarakat pekebun; (2) mendeskripsikan potensi sekolah dan ocial ocial, ekonomi, dan budaya masyarakat pekebun untuk penguatan pelibatan partisipasi masyarakat pekebun; dan (3) mengembangkan standar prosedur penguatan pelibatan partisipasi masyarakat (**SP4M**) dalam mengimplementasikan program sekolah.

C. Luaran Penelitian Tahun-1

Penelitian tahun pertama telah menghasilkan luaran berupa konsep model manajemen berbasis sekolah yang lebih memprioritaskan pelibatan partisipasi masyarakat pekebun di Provinsi Bengkulu, yang dikemas dalam bentuk: (1) instrumen penggalian potensi sekolah dan ocial ocial, ekonomi, dan budaya masyarakat pekebun; (2) deskripsi potensi sekolah dan ocial ocial, ekonomi, dan budaya masyarakat pekebun untuk penguatan pelibatan partisipasi masyarakat; dan (3) model standar prosedur penguatan pelibatan partisipasi masyarakat (**SP4M**) dalam mengimplementasikan program sekolah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

G. Manajemen Sekolah Dalam Konteks Otonomi Daerah

Dari berbagai studi dan pengamatan lapangan antara lain dinyatakan bahwa sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, yaitu: (1) kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan (output) yang terlalu memusatkan pada masukan (input) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan; (2) Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara desentralistik namun masih berbudaya sentralistik, menyebabkan ketergantungan kepada birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Di samping itu segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan sekolah kehilangan kemandirian, inisiatif, dan kreativitas. Hal tersebut menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang optimal; (3) peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peran serta mereka sangat penting di dalam proses-proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas (Depdiknas, 2006).

Pandangan terhadap sekolah di era otonomi daerah telah bergeser dari posisi sebagai unit pelaksana teknis (UPT) pusat yang berada di daerah ke unit organisasi terkecil dan mandiri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keberhasilannya. Sebagai UPT sekolah hanyalah menjalankan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dewasa ini fungsinya berubah menjadi unit pengambil keputusan/kebijakan pada level sekolah. Hal ini disebabkan oleh memandang bahwa sekolah sebagai lembaga yang unik kondisinya, tidak ada satu sekolahpun yang sama persis potensi dan permasalahannya. Oleh sebab itu, kebijakan apapun yang diambil, dan keputusan apapun yang akan dilaksakan hanya warga sekolah itu sendiri yang mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, dan mereka juga yang tahu tidak apa yang tepat untuk memecahkan masalahnya. Dalam implementasinya, otonomi daerah

banyak yang salah orientasi dan salah kelola. Pengambilan keputusan dan perencanaan yang seharusnya dapat dibuat secara cepat dan tepat waktu, pada kenyataannya banyak terhambat oleh adanya berbagai “kepentingan” yang tidak sejalan dengan misi organisasi.

Saat ini sedang berlangsung perubahan paradigma manajemen pemerintahan. Beberapa perubahan tersebut antara lain berupa: (1) Orientasi manajemen yang lebih berorientasi pasar. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam mengolah dan menetapkan kebijaksanaan untuk mengatasi persoalan yang timbul; (2) Orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian berubah ke alam demokrasi. Pendekatan kekuasaan bergeser ke sistem yang mengutamakan peranan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi pertimbangan utama dalam tatanan kehidupan yang demokratis; (3) Perubahan dari sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan. Kekuasaan tidak lagi terpusat di satu tangan melainkan dibagi ke beberapa pusat kekuasaan secara seimbang; (4) Sistem pemerintahan yang jelas batas dan aturannya seakan-akan menjadi negara yang sudah tidak jelas lagi batasnya (*boundaryless organization*) akibat pengaruh dari tata-aturan global. Keadaan ini membawa akibat tata-aturan yang hanya menekankan tata-aturan nasional saja kurang menguntungkan dalam percaturan global. Fenomena ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan sehingga desentralisasi pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tentu saja desentralisasi pendidikan bukan berkonotasi negatif, yaitu untuk mengurangi wewenang atau intervensi pejabat atau unit pusat melainkan lebih berwawasan keunggulan. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh pusat sering tidak efektif karena kurang mempertimbangkan keragaman dan kekhasan daerah (Miftah Thoha, 1999).

B. Manajemen Berbasis Sekolah

Konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dijadikan acuan dalam pengelolaan sekolah yang lebih mandiri dan profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Sisdiknas, di banyak sekolah belum dapat diimplementasikan secara benar, bahkan cenderung sebaliknya. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh rekrutmen kepala sekolah yang kurang transparan, kurang objektif, dan belum berlandaskan pada regulasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Akibatnya, banyak kepala sekolah yang tidak mandiri, bergantung, tidak kreatif, kaku, “penakut”, kurang

profesional, bersikaf ABS (asal bos senang), menunggu perintah, serta menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasan sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (*stake-holder*) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka MBS akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada.

C. Pelibatan Patisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sekolah

Sistem pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, akan menghambat tumbuhnya kreativitas, dan menciptakan budaya selalu menunggu petunjuk dari atas. Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit-unit yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, termasuk dalam menangani persoalan pendidikan. Banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan ataupun masyarakat. Di bawah ini dikutip beberapa ocial pendorong penerapan desentralisasi dalam bidang pendidikan, antara lain dikemukakan oleh Nuril Huda (1999) bahwa:

- orangtua, kelompok masyarakat, legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru mesti turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan;
- ada anggapan bahwa pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah;
- ketidakmampuan birokrasi untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam;
- kinerja sekolah dinilai tidak dapat memenuhi tuntutan baru dari masyarakat pendukungnya;
- tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.

D. Misi Perubahan Kurikulum 2013

Desentralisasi pendidikan, mencakup tiga hal, yaitu; (1) manajemen berbasis lokasi (*site based management*); (2) pendeklegasian wewenang; (3) inovasi kurikulum, yang kini diimplementasikan dalam perubahan kurikulum 2013. Pada dasarnya manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengurangan administrasi pusat adalah konsekwensi dari yang pertama dengan diikuti pendeklegasian wewenang dan urusan pada sekolah. Inovasi kurikulum menekankan pada pembaharuan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di daerah yang berada.

Pada kurikulum 2013, pemerintah pusat menetapkan kompetensi lulusan dan materi-materi minimal. Daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan pengayaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan daerah. Pada umumnya program pendidikan yang tercermin dalam silabus sangat erat dengan program-program pembangunan daerah. Sebagai contoh, suatu daerah yang menetapkan untuk mengembangkan ekonomi daerahnya melalui bidang pertanian, implikasinya mata pelajaran IPA akan diperkaya dengan materi-materi biologi pertanian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian. Manajemen berbasis lokasi yang merujuk ke sekolah, akan meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, orangtua, siswa, dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa Kurikulum 2013 tidak akan berdampak pada terciptanya generasi tukang. Kurikulum baru justru disusun untuk menjawab masalah gersangnya budaya dewasa ini. “Kurikulum 2013 justru didesain untuk mengatasi kegersangan budaya. Akibat kegersangan budaya ini makin banyak perilaku yang tak berbudaya,” kata Nuh di Jakarta, Kamis (28/2/2013). “Jauh dari hanya mencetak tukang saja. Tapi bukan berarti anak-anak yang unggul dalam *technical skill* tidak dibutuhkan,” ungkap Nuh. Beberapa waktu lalu, desain kurikulum 2013 dikritik oleh seorang pakar pendidikan dari Institut

Teknologi Sepuluh November yang menyebutkan kurikulum baru hanya akan mencetak generasi tukang. Nuh sebagai pimpinan lembaga yang menggagas kurikulum baru membantahnya. Nuh menduga bahwa, asumsi tersebut muncul karena salah persepsi pada landasan desain kurikulum baru ini. Pasalnya, selama ini kementerian selalu menyebutkan bahwa kurikulum baru ini berlandaskan pada pengembangan *skill*. “Padahal tidak hanya pengembangan *skill*. Ada tiga yang tidak boleh lepas. Pengembangan *skill*, *attitude* dan *knowledge*. Itu harus bersamaan,” ungkapnya. Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu mengatakan bahwa desain kurikulum ini tidak hanya menekankan pada aspek ilmiah saja. Justru kurikulum baru ini akan lebih kaya dengan nilai-nilai seni budaya dan moral. Salah satu langkah yang diambil adalah menambah durasi mata pelajaran seni budaya dan memberi ruang bagi daerah untuk memasukkan mata pelajaran yang sesuai dengan tradisi kedaerahannya dalam muatan lokal.

E. Pemberdayaan Masyarakat

Misi desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pemanfaatan potensi daerah, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menunjang terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jaman, antara lain terserapnya konsep globalisasi, humanisasi, dan demokrasi dalam pendidikan. Penerapan demokratisasi dilakukan dengan mengikutsertakan unsur-unsur pemerintah setempat, masyarakat, dan orangtua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Hal ini tercermin dengan adanya kurikulum muatan lokal. Kurikulum juga harus mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional. Proses belajar mengajar menekankan terjadinya proses pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran lingkungan yaitu memanfaatkan lingkungan baik fisik maupun sosial sebagai media dan sumber belajar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan alat pemersatu bangsa (Donoseputro, M. Suara Guru-4; 3-6, 1997).

F. Paradigma Penelitian

Pengembangan kurikulum 2013, selain untuk mencari jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kurikulum 2006, bertujuan untuk mendorong peserta didik, agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang diperoleh atau diketahui setelah menerima materi pembelajaran. Melalui pendekatan tersebut diharapkan para siswa mempunyai kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Mereka jadi lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Sedikitnya nampak pada lima entitas pendidikan, seperti: peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen satuan pendidikan, ocial dan bangsa, serta masyarakat umum yang diharapkan mengalami perubahan. Pada skema 2 di atas digambarkan perubahan yang diharapkan pada masing-masing entitas pendidikan.

Dalam rangka mendidik peserta didik sehingga mereka menjadi lulusan yang kompeten diperlukan pelibatan partisipasi masyarakat, terutama dalam rangka implementasi kurikulum 2013, yang akan menghasilkan lulusan yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan memiliki sikap berkarakter kuat. Pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud memerlukan identifikasi ocial ekonomi, ocial, dan budaya masyarakat. Atas dasar kondisi faktor-faktor tersebut peneliti melakukan intervensi untuk penguatan peran serta masyarakat, serta penguatan manajemen dan budaya sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model yang tepat untuk peningkatan pelibatan partisipasi masyarakat pendukung sekolah dimana sekolah berada. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam rangka implementasi kurikulum 2013 diharapkan dapat mengubah calon peserta didik menjadi lulusan yang kompeten yang didukung oleh adanya penguatan peran serta masyarakat serta penguatan manajemen dan budaya sekolah yang didasari pula oleh pemahaman akan kekuatan faktor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di sekitar sekolah.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pengembangan "model manajemen berbasis sekolah yang lebih mengedepankan pelibatan partisipasi masyarakat" ini termasuk kategori penelitian dan pengembangan (*Research and Development*), posisinya berada pada fase pertama yaitu pengembangan (*development*). Pada fase ini akan dikaji potensi sekolah dan faktor ekonomi, sosial dan budaya masyarakat guna mendukung upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Kajian ini memadankan (adakan sinkronisasi) pengembangan potensi sekolah dengan berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung implementasi program sekolah. Optimalisasi pelibatan partisipasi masyarakat terhadap sekolah akan mampu menjadi penggerak utama pencapaian kualitas pembelajaran yang diharapkan.

B. Rancangan Penelitian

Penelitian tahun pertama fokus pada identifikasi potensi sekolah dan faktor ekonomi, sosial dan budaya masyarakat guna mengembangkan model manajemen berbasis sekolah yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat. Pada sesi ini peneliti mengembangkan model manajemen partisipatif bagi sekolah subjek penelitian di wilayah berkarakteristik **perkebunan**. Pengembangan model MBS dimaksud dengan mempertimbangkan penguatan pada aspek: (1) proses pelibatan partisipasi masyarakat melalui *focus group discussion* (FGD); (2) penguatan pendidik dan tenaga kependidikan, serta stake-holder pendidikan di sekitar sekolah; (3) kesesuaian partisipasi masyarakat dengan kebutuhan sekolah. Pada **tahun kedua** penelitian fokus pada implementasi penguatan pelibatan partisipasi masyarakat dengan basis kegiatan di sekolah melalui forum FGD, kegiatannya fokus pada: (1) *Expose* program sekolah dan strategi pencapaiannya; (2) *Expose* potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar sekolah; (3) *Gathering*, untuk mempertemukan potensi sekolah dengan potensi masyarakat. Pada **tahun ketiga** akan dilaksanakan diseminasi MBS melalui pengabdian pada masyarakat dengan fokus pada penguatan pelibatan partisipasi masyarakat dalam implementasi program sekolah di sekolah sasaran.

Berdasarkan rancangan penelitian dan pengembangan tersebut, di bawah ini disiapkan langkah-langkah penelitian tahun-1 sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan penelitian

- a. Mengidentifikasi sekolah yang memenuhi karakteristik pekebun (melalui audiensi dengan 100 kepala sekolah yang berasal dari 10 kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu sebagai informan awal melalui acara Penguatan MBS se Provinsi Bengkulu pada tanggal 15-17 Juli 2013 bertempat di hotel Ananda, Bengkulu.
- b. Bekerjasama dengan kepala sekolah sampel untuk menindaklanjuti rencana penguatan pelibatan partisipasi masyarakat dan merancang kegiatan lanjutan dalam kerangka penelitian dan pengembangan model.

2. Pelaksanaan Penelitian

Pertemuan dengan warga sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat setempat dan perwakilan orang tua murid di sekolah objek penelitian di empat lokasi yang memiliki karakteristik pekebun sebagai peserta forum FGD dalam rangka:

- a. mengidentifikasi potensi sekolah dan faktor ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang berpeluang dapat meningkatkan peningkatan pelibatan partisi-pasi masyarakat;
- b. mengekspose program sekolah; dan
- c. melaksanakan penggalangan (*gathering*) penguatan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan implementasi program sekolah.

Kegiatan tersebut diikuti oleh kurang lebih 50 orang di setiap lokasinya, atau sekitar 200 orang untuk empat lokasi penelitian.

C. Subjek Penelitian dan Pengembangan

Subjek penelitian ini antara lain adalah: (1) Tim manajemen sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, perwakilan siswa sekolah di wilayah sasaran; (2) Unsur masyarakat yang terdiri dari dewan pendidikan, perwakilan dari perusahaan atau kelembagaan sosial masyarakat, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan perwakilan orang tua siswa yang berada di wilayah sasaran.

Sekolah lokasi penelitian meliputi empat sekolah di wilayah sampel yang karakteristiknya dibedakan antara: (1) pekebun pekerja pada perusahaan perkebunan; (2) pekebun yang dikelola secara kemitraan antara kebun inti dan kebun plasma; (3) pekebun yang mengusahakan kebun secara madiri dan memiliki pekerja upahan; serta (4) pekebun yang terdiri dari pekebun kecil dan buruh lepas perkebunan.

D. Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data

Pada tahun-1 penelitian dan pengembangan model manajemen partisipatif ini diperlukan data tentang: (1) **potensi** sekolah faktor ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pekebun di sekitar sekolah; dan (2) mengembangkan model manajemen yang memprioritaskan penguatan pelibatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung implementasi program sekolah. Pada sesi ini peneliti mengembangkan model manajemen partisipatif bagi **sekolah subjek penelitian** untuk **wilayah perkebunan**. Data potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat diperoleh dengan teknik *etno-grafik*. data dianalisis dan ditampilkan dalam wacana lisan faktual, dengan alat bantu instrumen (cheklist) dan format jawaban naratif. Sedangkan data potensi sekolah diperoleh dari dokumen sekolah berupa: profil sekolah, rencana pengembangan sekolah, program kerja sekolah, serta laporan pertanggung-jawaban kegiatan dan keuangan sekolah. Penarikan simpulan tentang faktor ekonomi, sosial dan budaya masyarakat guna mendukung implementasi program sekolah. Alhasil, ada sinkronisasi antara potensi sekolah dengan ketersediaan berbagai sumber yang ada di masyarakat. Data diolah dengan menggunakan statistik sederhana dan dimaknai secara kualitatif.

E. Indikator Pencapaian

Keberhasilan penelitian ini antara lain dapat menggambarkan potensi sekolah serta faktor ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang kondusif untuk mendukung implementasi program sekolah, antara lain berupa: (1) kebiasaan hitup bergotong royong; (2) arisan, koperasi atau sejenisnya, (3) kegiatan ekonomi kemasyarakatan yang nampak pada hasil panen, waktu panen, dan penggunaannya, hingga diketahui berapa banyak yang digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak mereka. Di sisi lain perlu analisis RPS dan RAPBS yang fokus pada: (4) potensi pengembangan sekolah; (5) fokus pada pelaksanaan program rutin dan pelaksanaan pengembangan sekolah; serta (6)

menentukan peluang program yang layak mendapatkan dukungan masyarakat. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk model manajemen berbasis sekolah yang memprioritaskan penguatan partisipasi masyarakat. Dipresentasikan melalui seminar tingkat tingkat kabupaten, seminar nasional, dan/atau seminar internasional.

F. Pelaksanaan Forum Focus Group Discussion

1. Pengurusan Izin dan Penetapan Sekolah Sasaran
2. Identifikasi Dokumen Sekolah
 - a. Rencana strategis sekolah,
 - b. Rencana pengembangan sekolah (RPS),
 - c. Rencana Kerja Sekolah (RKS Tahun 2013),
 - d. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS Tahun 2013),
 - e. Kerjasama dengan Masyarakat, Komite Sekolah, dan Orang Tua Siswa.
3. Pengembangan Instrumen
 - a. Panduan identifikasi program unggulan sekolah,
 - b. Paduan identifikasi potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pekebun,
 - c. Rancangan penguatan pelibatan partisipasi masyarakat.
4. Identifikasi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat
 - a. Pekerjaan orang tua siswa,
 - b. Tingkat pendidikan penduduk,
 - c. Penghasilan utama & penunjang keluarga,
 - d. Rata-rata pengeluaran keluarga
 - e. Alokasi biaya pendidikan oleh keluarga dibanding biaya lainnya, dan
 - f. Budaya gotong royong pada masyarakat sekitar sekolah.
5. Rapat Komite Sekolah & Orang Tua Siswa Dalam *Focus Group Discussion*
 - a. Paparan kepala sekolah tentang program kerja sekolah dan program unggulan sekolah,
 - b. Penjelasan pendanaan kegiatan operasional dan pembangunan sekolah,
 - c. Peluang pelibatan masyarakat dalam persepsi warga sekolah,
 - d. Kesediaan masyarakat, komite, dan orang tua siswa untuk mendukung program kerja sekolah.

6. Penguatan Pelibatan Partisipasi Masyarakat
 - a. Pengembangan standar prosedur pelibatan partisipasi masyarakat (**SP3M**) dalam implementasi program sekolah sebagai model manajemen yang lebih mengedepankan pelibatan partisipasi masyarakat.
 - b. Pengembangan model-model pelibatan partisipasi masyarakat:
 - 1) Sumbangan pembiayaan,
 - 2) Partisipasi dalam rapat awal tahun, tengah tahun, dan akhir tahun,
 - 3) Partisipasi satuan ke-tenaga kerja-an dalam program sekolah,
 - 4) Partisipasi orang tua dalam program pembelajaran di kelas,
 - 5) Penggunaan nara-sumber serta potensi lingkungan untuk menunjang implementasi program sekolah, dan
 - 6) Kerjasama mutualisme antara sekolah dengan masyarakat.

G. Kisi-kisi Instrumen Penggalian Data Penelitian

1. Profil Sekolah Sasaran
 - a. Identitas Sekolah,
 - b. Karakteristik dan kondisi umum sekolah sasaran,
 - c. Karakteristik lingkungan internal dan daya dukung lingkungan eksternal dalam mengimplementasikan program sekolah,
 - d. Keunggulan dan kelemahan sekolah dalam mengembangkan potensi keunggulan dan mengeliminasi kelemahan sekolah,
 - e. Prospek penguatan pelibatan partisipasi masyarakat dan potensi penguatan partisipasi masyarakat terhadap sekolah sampel.
2. Potensi Sosial-Budaya, Ekonomi, dan Keberagamaan Masyarakat
 - a. Potensi Sosial-Budaya Masyarakat
 - 1) Gotong Royong
 - a) Kebiasaan gotong royong dalam perbaikan atau pengadaan fasilitas umum (pengerjaan jalan, jembatan, siring, sekolah, dan mesjid/mushola).

- b) Kebiasaan gotong royong dalam pekerjaan keluarga (pembangunan rumah, pekerjaan kebun, hajatan, kemalangan, atau kematian)
 - c) Individualis, kerukunan bertetangga, dan kedulian lingkungan
 - 2) Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
 - a) Kebiasaan menjaga lingkungan (siskamling)
 - b) Ketertiban kemasyarakatan
 - 3) Kesenian dan kebudayaan setempat
 - a) Kesenian dan budaya setempat
 - b) Keterampilan khusus khas daerah
- b. Potensi Ekonomi Masyarakat
- 1) Sumber Penghasilan Keluarga
 - a) Jenis penghasilan utama dan penunjang
 - b) Rerata jumlah penghasilan
 - c) Lembaga ekonomi pendukung kesejahteraan keluarga (Lumbung, kooperasi, dan kerukunan lain yang bersifat ekonomis)
 - 2) Pengeluaran belanja keluarga
 - a) Jenis-jenis pengeluaran
 - b) Prosentase pembiayaan keluarga
 - c) Alokasi biaya untuk pendidikan anak
- c. Potensi kehidupan keberagamaan
- 1) Pemeluk agama
 - a) Prosentase jenis pemeluk agama
 - b) Mayoritas keberagamaan dan dampaknya terhadap pendidikan di sekolah
 - 2) Kehidupan keberagamaan
 - a) Fasilitas penunjang kehidupan beragama (mesjid, surau, dll)
 - b) Perkumpulan, majlis taklim pembelajaran agama (anak, remaja, dewasa)
3. Program Sekolah yang Dapat Digunakan untuk Pelibatan Partisipasi Masyarakat Pekebun sebagai Model Intervensi Penguan Pelibatan Partisipasi Masyarakat

- a. Program Rutin dan Operasional Sekolah
 - 1) Program rutin dan operasional utama (intra kurikuler)
 - 2) Program rutin dan operasional penunjang (ekstra kurikuler)
 - b. Program Pengembangan Sekolah
 - 1) Rencana pengembangan sekolah (RPS)
 - 2) Penggunaan RPS sebagai acuan utama pengembangan sekolah
 - c. Program Insidental
 - 1) Pembangunan sarana fisik sekolah
 - 2) Pengadaan alat/bahan keperluan pembelajaran dan penunjang
 - 3) Kegiatan pemenuhan kriteria akreditasi dan peningkatan mutu
4. Standar Prosedur Penguatan Pelibatan Partisipasi Masyarakat (SP4M) dalam rangka implementasi program sekolah
- a. Standar Kelengkapan Dokumen
 - 1) Visi, misi, dan strategi sekolah
 - 2) Profil sekolah
 - 3) Rencana pengembangan sekolah (RPS)
 - 4) Rencana operasional tahunan/semesteran
 - 5) Laporan tahunan/semesteran
 - 6) Laporan kinerja tahunan sekolah
 - 7) Rencana kerja kepala sekolah dan guru
 - 8) Laporan kinerja kepala sekolah, guru, dan tata usaha sekolah
 - b. Standar Proses Penyiapan dan Pengembangan Dokumen Sekolah
 - 1) Penyusunan dan pelembagaan visi, misi, dan strategi sekolah
 - 2) Updating profil sekolah dalam bentuk laporan tahunan/semesteran
 - 3) Penyusunan dan adaptasi RPS
 - 4) Penyusunan dan adaptasi RKS
 - 5) Penyusunan laporan kinerja tahunan/semesteran
 - 6) Penyusunan laporan kinerja 4-tahunan (masa jabatan kepala sekolah)
 - 7) Monitoring dan evaluasi kinerja tim

- a) Monitoring tri-wulan-1
 - b) Monitoring tri-wulan-2
 - c) Evaluasi kinerja semester-1 & Revisi rencana kerja semester-2
 - d) Monitoring tri-wulan-3
 - e) Monitoring tri-wulan-4
 - f) Evaluasi kinerja semester-2 & Revisi rencana kerja tahun +1
- c. Standar prosedur pelibatan partisipasi masyarakat dalam implementasi program sekolah
- 1) Latar belakang perlunya penguatan partisipasi masyarakat
 - 2) Tujuan penguatan partisipasi masyarakat
 - 3) Hasil yang diharapkan
 - 4) Strategi penguatan pelibatan partisipasi masyarakat pada perencanaan program
 - a) Pelibatan masyarakat pada perencanaan awal tahun,
 - b) Inisiasi usulan program oleh warga sekolah,
 - c) Negosiasi dengan komite sekolah.
 - d) Rapat komite sekolah dan orang tua murid guna menyepakati dan peluncuran program tahunan
 - e) Penetapan kesepakatan program bantuan tahun-1
 - (1) Bentuk-bentuk bantuan,
 - (2) Teknik pelibatan peran serta masyarakat dalam pemberian bantuan,
 - (3) Teknik pemantauan kemajuan pelaksanaan program.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah dicapai dalam penelitian ini antara lain berupa: (1) Panduan Identifikasi Sosial-Ekonomi, dan Budaya Masyarakat Pekebun; (2) Panduan Identifikasi Program Unggulan Sekolah; (3) Profil SEB Masyarakat Pekebun, dan Peluang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sekolah; (4) Program Unggulan Sekolah dan Rancangan Pelibatan Partisipasi Masyarakat; (5) Contoh-contoh Model Partisipasi Masyarakat; (6) Draft Prosedur Operasi Standar Pelibatan Partisipasi Masyarakat (**SP3M**) dalam implementasi program sekolah sebagai Model Manajemen Yang Lebih Mengedepankan Pelibatan Partisipasi Masyarakat.

Penyajian poin (1) dan (2) disajikan pada Bab 3 poin G berupa Kisi-kisi Instrumen Penggalian Data Penelitian melalui FGD. Sedangkan pada bab IV ini disajikan hasil studi kasus setelah pelaksanaan focus group discussion berupa (A) Profil SEB Masyarakat Pekebun, dan Peluang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sekolah; (B) Program Unggulan Sekolah dan Rancangan Pelibatan Partisipasi Masyarakat; (C) Contoh-contoh Model Partisipasi Masyarakat; (D) Draft Prosedur Operasi Standar Pelibatan Partisipasi Masyarakat (**SP3M**) dalam implementasi program sekolah sebagai Model Manajemen Yang Lebih Mengedepankan Pelibatan Partisipasi Masyarakat.

A. Hasil Penelitian

1. Hasil FGD SMPN 1 Merigi

a. Potensi Sekolah

1). Karakteristik Sekolah

SMPN 1 Merigi memiliki bangunan seluas 890 m² dan berdiri di atas lahan 6.053 m² dan sudah bersertifikat. Sekolah dipimpin oleh Ibu Dra. Maryani Yensih, M.Pd. Pada tahun 2013/2014 sekolah mempunyai murid sebanyak 251 orang, terbagi ke dalam 8 romongan belajar. Kelas VII dua rombel, kelas VIII tiga rombel, dan kelas IX tiga rombel. Sekolah memiliki guru sebanyak 26 orang, terdiri dari 22 orang guru PNS dan 4 orang honorer. 24 diantaranya lulusan S1, 1 orang berpendidikan berpendidikan D2, dan 1 orang lagi D1. Sekolah berdiri sejak tahun 2005 sampai saat ini telah meluluskan

delapan angkatan. Namun demikian, dengan berbagai sumberdaya yang ada sekolah ini baru mencapai akreditasi C.

2). Karakteristik Lingkungan Sekolah

SMPN 1 Merigi berada di Desa Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang. Wilayah ini merupakan daerah pertanian dengan komoditas utama palawija (sayuran), tanaman kopi dan sengon. Wilayah ini berada pada ketinggian 300 m diatas permukaan laut, dengan kontur lahan berbukit dan lembah (pegunungan), udara yang sangat sejuk. Bupati Kepahiang termasuk peduli terhadap pendidikan dan pertanian. Beliau memiliki slogan motivasi masyarakat dengan tema “mau kaya tanam sengon” dan “mau pintar kuliah di Dehasen”. Sebagian orang tua murid (50%) berpendidikan SLTA, 25% lulusan SMP, 15% lulusan SD, hanya 5% yang tamatan perguruan tinggi, dan masih ada 5% orang tua yang tidak tamat SD.

3). Keunggulan dan Kelemahan SMPN 1 Merigi

SMPN 1 Merigi memiliki keunggulan dalam (1) motivasi belajar siswa, (2) kinerja guru, (3) keakraban siswa, dan (4) efektivitas pemakaian waktu belajar siswa. Siswa siap dalam kondisi semangat belajar, mendapat dukungan dari orang tua, dan guru selalu siap untuk mengajar. Kurikulum yang diterapkan sesuai dengan keperluan masyarakat, orang tua, dan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan siswa. Guru-guru yang berpengalaman dan selalu membuat persiapan mengajar. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan alumni yang sangat baik, serta dukungan lingkungan internal yang baik.

Selain keunggulan tersebut SMPN 1 Merigi kelebihan 10% guru, ruang belajar masih kurang, masih ada ruang kelas yang digunakan double fungsi sebagai perpustakaan dan laboratorium. Kelengkapan peralatan PBM dan olah raga masih perlu ditingkatkan. Keadaan ekonomi orang tua siswa kurang menguntungkan karena masih banyak yang berpenghasilan rendah. Sebanyak 10% orang tua siswa berpenghasilan antara 200.000-600.000,- sebanyak 60% berpenghasilan antara 600.000,- 1.000.000,- dan hanya 30% dari mereka yang berpenghasilan lebih dari 1.000.000,-. Sungguh, suatu keadaan ekonomi orang tua yang kurang memadai, begitu juga dengan dukungan masyarakat dan dunia usaha yang sangat minim.

4). Prospek Pelibatan Partisipasi Masyarakat

SMPN 1 Merigi memerlukan adanya: (1) optimasi beban mengajar; (2) penambahan ruang kelas dan ruang penunjang lain; (3) penambahan sarana belajar; (4) pengadaan peralatan olah raga dan sarana pembelajaran muatan lokal; serta (5) penguatan partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk memenuhi semua keperluan pendidikan di sekolah.

b. Potensi Sosial-Budaya, Ekonomi, dan Keberagamaan Masyarakat

1). Potensi Sosial-Budaya Masyarakat

Kebiasaan gotong royong di Kecamatan Merigi sudah mulai pudar, terutama dalam pemeliharaan fasilitas umum, seperti pemeliharaan jalan lingkungan, jembatan, siring, sekolah, mesjid, mushola, dan aset pemerintah lainnya. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa pemeliharaan fasilitas umum dan aset pemerintah merupakan tanggungjawab pemerintah. Namun demikian, bergotong royong memperbaiki fasilitas ibadah, seperti mesjid dan mushola, masih cukup “baik” kondisinya. Hal ini disebabkan oleh persepsi yang berbasis pada nilai ibadahnya yang lebih tinggi, karena dianggap amal-ibadah yang berhubungan langsung Allah, dan berharap mendapat balasan “duniakhairat”. Sementara dalam pemeliharaan fasilitas umum lainnya seolah dianggap hanya untuk kepentingan “duniawi”.

Kebiasaan **bergotong royong dalam pekerjaan keluarga**, khususnya dalam pembangunan rumah, pengeringan lahan (kebun, sawah, dan ladang), hajatan, penanganan musibah, dan kematian masih sangat rukun dan terpelihara. Dalam membangun rumah anggota keluarga dan tetangga biasa bergantian saling membantu, bahkan seringkali meminjamkan bahan kepada keluarga yang sedang membangun dan akan dibayar dengan barang yang senilai pada saat yang meminjami akan melaksanakan membangun. Selain itu, mereka selalu bergotong royong manakala ada hajatan, kematian, atau pada saat penanganan musibah lainnya.

Dalam hal **kerukunan hidup bertetangga dan kepedulian** terhadap lingkungan di Kecamatan Merigi sudah mulai “pudar”, masyarakat pada umumnya sudah lebih individualis. Sehingga nampak sibuk dengan urusan masing-masing. Peneliti berpandangan bahwa kurang terpeliharanya kerukunan bertetangga disebabkan oleh

media pertemuan yang kurang, dan even-evennya juga kurang, kekurangan ini disebabkan oleh pandangan akan perlunya jamuan dalam setiap acara perkumpulan.

2). Keamanan Lingkungan

Secara umum **pelaksanaan siskamling** di Kecamatan Merigi mulai “pudar”, namun dalam setahun terakhir pemda memotivasi untuk menggiatkan kembali kegiatan “ronda”, dengan jalam membangun “Pos Ronda” di setiap kelurahan atau bahkan di setiap RT/RW. Setiap keluarga, wajib bertugas semalam dalam seminggu, dan setiap malam ditugaskan sekitar 3-4 orang untuk piket “mengamankan lingkungan”. Keluarga yang berhalangan atau “enggan” menjalankan tugas tersebut, dikenakan kewajiban membayar pengganti dimana tugasnya akan digantikan oleh petugas yang secara khusus akan mengantikannya.

Penataan lingkungan di Kecamatan Merigi pada umumnya dilakukan melalui program pemerintah. Beberapa kelurahan pada saat ini sedang melaksanakan PNPM (program nasional pembangunan mandiri). Penataan lingkungan menjadi bagian dari kegiatan pengembangan wilayah, dananya bersumber dari bantuan luar negeri, misalnya dengan pendanaan dari Aus-Aid. Sementara itu, kegiatan penataan lingkungan yang berbasis aktivitas masyarakat pada saat ini “hampir punah”.

3). Kesenian dan budaya setempat

Seni dan budaya setempat di Kecamatan Merigi, hanya tinggal “rebana” yang dibudayakan. Rebana dimanfaatkan pada acara adat mengiringi pernikahan, dan acara peringatan hari-hari besar keagamaan. Itupun pada umumnya dilakukan oleh kaum “Usia lanjut”. Sedangkan kaum mudanya nampak tidak minat lagi untuk mengembangkan seni budaya tersebut. Peluang akan muncul manakala pihak sekolah (guru kesenian) mengambil inisiatif untuk meremajakan seni rebana, ataupun kesenian lain yang berakar dari budaya masyarakat lokal.

4). Keterampilan khusus khas Merigi, Kepahiang, dan Curup

Daerah Kepahiang dan Curup terkenal dengan pembuat kerajinan makanan ringan. Ada beberapa produsen rumahan yang memproduksi makanan ringan yang berbasis pada hasil alam setempat, antara lain berupa: (1) jagung “kelitik”, (2) kopi bubuk; (3) selai pisang; (4) rengginang; (5) kacang panggang; (6) tart; (7) stik wortel; serta (8) kripik kentang, singkong, ubi jalar, dan sejenisnya. Kualitas dan rasa makanan

lokal tersebut sudah berkenan di lidah para tamu yang datang ke Kepahiang dan Curup. Makanan tersebut dijadikan makanan ringan dalam perjalanan ataupun untuk oleh-oleh.

c. Potensi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Merigi

1). Penghasilan utama

Penghasilan utama masyarakat di Kecamatan Merigi berasal dari pekebun kopi dan palawija. Selain itu ada dua komoditas baru yang direkomendasikan untuk ditanam secara masal, yaitu tanaman sengon yang dikombinasi (tumpang sari) dengan talas. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga, beberapa kegiatan pendukung peningkatan ekonomi diselenggarakan, antara lain ada yang lumbung, kooperasi, dan kerukunan ekonomis lainnya.

2). Rerata jumlah penghasilan

Dari penghasilan utama yang diperoleh orang tua siswa di Kecamatan Merigi antara lain diperoleh data bahwa sebanyak 10% orang tua siswa berpenghasilan antara 200.000-600.000,- sebanyak 60% berpenghasilan antara 600.000,-1.000.000,- dan 30% lainnya mereka berpenghasilan lebih dari 1.000.000,-. Komposisi dan nilai penghasilan tersebut masih sangat memprihatinkan, karena masih jauh dari cukup untuk dapat digunakan biaya hidup yang layak. Nilai tersebut berada di bawah standar minimum upah regional.

3). Belanja keluarga

Pengeluaran belanja keluarga untuk pendidikan di SMPN 1 Merigi sebanyak Rp. 114.990.000,- per tahun. Setiap siswa mengeluarkan biaya pendidikan sebanyak Rp 459.000,- per tahun, atau sekitar Rp. 40.000,- per bulan. Pengeluaran tersebut belum termasuk biaya yang dikeluarkan dan dibenajakan secara peribadi untuk kepentingan siswa yang bersekolah di SMPN 1 Merigi, dan anak-anak mereka yang bersekolah di tempat lain. **Prosentase pembiayaan keluarga untuk pendidikan** rata-rata belanja keluarga sebanyak Rp.1.000.000,- per bulan sedangkan biaya pendidikan sebanyak Rp. 100.000,- per bulan, maka pengeluaran pendidikan hanya sekitar 10% dari penghasilan orang tua siswa.

4). Potensi kehidupan beragama

Penduduk kabupaten Kepahiang pada umumnya (96%) beragama islam, hanya 4% saja yang selain islam. Mayoritas pemeluk agama mempunyai pengaruh terhadap pendidikan di sekolah. Penduduk yang mayoritas islam mempunyai berpengaruh terhadap kegiatan ekstrakurikuler, seperti baca-tulis al-qur'an, ceramah agama, dan latihan beribadah. Banyak kegiatan yang diadakan oleh pengurus mesjid, majlis taklim, ataupun lembaga keagamaan lainnya menyuburkan pendidikan agama oleh masyarakat. Fasilitas penunjang kehidupan beragama (mesjid, surau, dll) terdapat di setiap desa ada mesjid, bahkan di beberapa desa ada yang memiliki surau-surau yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan TPA dan TPD atau majlis taklim untuk anak-anak, remaja, kaum bapak, dan kaum ibu.

d. Program Unggulan SMPN 1 Merigi

1). Program Rutin dan Operasional SMPN 1 Merigi.

SMPN 1 Merigi memiliki **program rutin** dan **operasional utama** yang dibuat dalam bentuk rencana kerja sekolah tahun 2013 yang kegiatannya disusun menurut kalender akademik yang dikelurakan oleh pihak sekolah ataupun pihak Dinas pendidikan Kabupaten Kepahiang. Dalam pelaksanaan pembelajaran banyak hal yang dapat melibatkan orang tua murid, masyarakat, dan dunia usaha. Namun demikian sekolah ini belum banyak melibatkan pihak-pihak terkait. Hal ini disebabkan oleh sulitnya menata kerjasama yang terintegrasi dengan kegiatan utama sekolah, terutama karena kesiapan guru untuk melibatkan pihak lain yang belum terlatih.

Pada pelaksanaan **program ekstra-kurikuler** lebih banyak peluang untuk dapat melaksanakan pelibatan partisipasi masyarakat, terutama pada kegiatan ekstra dalam bentuk keterampilan, keahlian, dan paket-paket khusus seperti pembelajaran muatan lokal. Keunggulan lokal dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dapat dijadikan sebagai mitra dalam menerapkan keterampilan dan membudayakan keahlian bagi generasi yang akan datang.

2). Rencana Pengembangan SMPN 1 Merigi.

Rencana pengembangan SMPN 1 Merigi sesungguhnya sudah cukup komprehensif, namun pengembangannya kurang sistematis, belum tersaji secara gradual.

Sehingga ada kesan bahwa kegiatan pengembangan sekolah merupakan aktivitas yang lepas-lepas dan tidak terintegrasi. Secara teoritik-praktis SMPN 1 Merigi menggunakan RPS sebagai acuan untuk melaksanakan pengembangan sekolah, namun secara dokumentasi tidak lengkap, nampak tidak saling terkait, dan kurang tersistem.

3). Program Insidental SMPN 1 Merigi

Pembangunan fisik dari pemerintah terbatas, seringkali berupa paket-paket, yang diperlukan tidak tersedia, yang tak diperlukan tersedia, sehingga kebutuhan tetap ada dan program tidak terserap. Bantuan masyarakat termasuk banyak, karena setiap tahun selalu ada program pembangunan fisik yang dilaksanakan. Perencanaannya dibuat setiap awal tahun, bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Pihak sekolah sengaja memanfaatkan momentum tahun ajaran baru untuk menggali partisipasi masyarakat. Cara ini memang cukup efektif dalam menghadirkan suatu, atau ada beberapa kegiatan yang didanai oleh komite sekolah. Beberapa bangunan fisik yang telah disumbang oleh masyarakat antara lain: (1) pembangunan mushola; (2) pembangunan pagar sekolah; (3) pembuatan lapangan upacara dan olah raga; serta (4) perbaikan kamar mandi dan *water closet (WC)*.

Pengadaan alat/bahan untuk keperluan pembelajaran pada umumnya telah cukup dengan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah. Tetapi ada beberapa jenis barang yang baru boleh dibeli setelah semua komponen keperluan pembelajaran terpenuhi. Oleh sebab itu, kepala SMPN 1 Merigi juga telah berhasil membeli alat-alat yang dananya bersumber dari orang tua siswa dan masyarakat melalui komite sekolah. Beberapa diantaranya adalah (1) pembelian 20 unit komputer untuk kepentingan laboratorium; (2) pembelian in-fokus; (3) pembelian gordeng; dan (4) pengadaan papan tulis (*white-board*).

4). Kegiatan pemenuhan kriteria akreditasi dan peningkatan mutu

Seperti tersurat dalam hasil akreditasi, bahwa SMPN 1 Merigi baru mendapat nilai akreditasi C, ini menandakan bahwa sesungguhnya banyak komponen input pembelajaran masih banyak yang belum memadai dan memerlukan pemenuhan yang segera, sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertuang dalam rekomendasi atas hasil akreditasi sekolah atau ketika menyusun evaluasi diri sekolah (EDS). Banyak hal harus

segera diadakan untuk kepentingan kemajuan sekolah, bahkan jauh di bawah kemampuan dan potensi sekolah untuk meningkatkan derajat mutunya. Solusinya hanya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

e. Standar Prosedur Penguatan Pelibatan Partisipasi Masyarakat (SP4M)

1). Dokumen Standar

Setelah melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi di SMPN 1 Merigi, diperoleh informasi atau data-data sebagai berikut. SMPN 1 Merigi telah memiliki dokumen yang berisikan Visi, misi, dan strategi sekolah, profil sekolah, rencana pengembangan sekolah (RPS), rencana kerja/operasional (RKS) tahunan/semesteran, rencana kerja kepala sekolah dan guru, belum memiliki laporan tahunan/semesteran, belum memiliki laporan kinerja tahunan sekolah, dan belum pernah memiliki laporan kinerja masa jabatan kepala sekolah .

Bukti fisik dokumen sekolah sebagaimana dimaksud telah tersedia, dan ada tiga hal yang belum tersedia sebagaimana dimaksud oleh peneliti, antara lain berupa laporan semester, laporan kinerja tahunan, dan laporan kinerja masa jabatan kepala sekolah. Setelah ditanya lebih jauh, memang tidak ada permintaan dari atasan akan laporan-laporan yang dimaksud. Laporan kinerja dibuat secara parsial oleh masing-masing panitia adhoc, dokumen lengkapnya ada pada panitia adhoc, kepala sekolah hanya menyimpan kopy laporan yang dianggap penting dan sering ditanyakan oleh pengawas pembina, dan petugas monitoring evaluasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten.

2). Standar Proses Penyiapan dan Pengembangan Dokumen Program

Setelah dilakukan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi di SMPN 1 Merigi, diperoleh informasi atau data dalam penyiapan dokumen, antara lain sebagai berikut; (1) penyusunan dan pelembagaan visi, misi, dan strategi sekolah (2) updating profil sekolah dalam bentuk laporan tahunan/semesteran; (3) penyusunan dan adaptasi RPS empat tahunan, pada tiap awal tahun; (4) penyusunan dan adaptasi RKS tahunan, pada tiap awal tahun; (5) penyusunan laporan kinerja tahunan/semesteran belum pernah dibuat; (6) penyusunan laporan kinerja 4-tahunan (masa jabatan kepala sekolah) juga

belum dibuat karena tidak ada permintaan atasan; serta (7) monitoring dan evaluasi kinerja tim.

Dengan ketiadaan laporan dan hasil monitoring yang terdokumentasikan, laporan kinerja antar waktu, laporan kinerja masa jabatan, serta updating profil sekolah hanya dibuat jika ada permintaan atau ketika membuat usulan kegiatan, maka prestasi dan kemajuan sekolah belum terpresentasikan. (1) Standar Prosedur Pelibatan Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program di SMPN 1 Merigi, antara lain meliputi: (a) Latar Belakang Perlunya Penguatan Partisipasi Masyarakat; (b) Kepala SMPN 1 Merigi menyatakan bahwa “sangat diperlukan penjelasan tentang latar belakang perlunya penguatan partisipasi masyarakat”. Alasan tersebut perlu dilengkapi dengan fakta dan data, kemudian digunakan untuk menyusun program pelibatan partisipasi masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan realisasi pelibatan partisipasi tahun sebelumnya menjadi salah satu penyebab keberhasilan program berikutnya. Pengalaman menurunnya partisipasi disebabkan oleh **“kurangnya komunikasi dan transparansi”** dalam pengelolaan partisipasi.

3). Tujuan Penguatan Partisipasi Masyarakat

Kepala SMPN 1 Merigi menyatakan bahwa setiap harapan pihak sekolah dikemas dalam bentuk program, dan setiap program berbasiskan tujuan. Berdasarkan kejelasan tujuan, kemanfaatan yang pasti, maka para orang tua dan masyarakat, yang dimotori oleh pengurus komite sekolah mendukung terealisasinya program tersebut. Dukungan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, dapat berupa: dana, tenaga, pandangan, atau keterlibatan langsung dalam program yang ditawarkan.

Hasil yang diharapkan: Kepala SMPN 1 Merigi menyatakan bahwa apabila hasil yang diharapkan dapat terwujud, pihak sekolah merasa puas dan dapat mengambil manfaat atas peran partisipasi masyarakat, maka keberhasilan program tersebut memiliki nilai tambah guna mensukseskan program berikutnya. Sebaliknya, apabila gagal, maka program berikutnya akan gagal pula, karena orang tua dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan tidak mau berpartisipasi lagi.

4). Strategi Penguatan Pelibatan Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan

Pelibatan masyarakat pada perencanaan awal tahun, menginisiasi usulan program oleh warga sekolah, menegosiasi dengan komite sekolah, rapat komite sekolah dan orang tua murid guna menyepakati dan peluncuran program tahunan, dan penetapan kesepakatan program bantuan, bentuk-bentuk bantuan, teknik pelibatan peran serta masyarakat dalam pemberian bantuan, dan teknik pemantauan kemajuan pelaksanaan program.

Kepala SMPN 1 Merigi menyatakan bahwa pelibatan masyarakat pada tahap perencanaan kegiatan menjadi langkah sukses pertama. Jika pandai mengemasnya, maka pihak sekolah dan komite sekolah akan mendapatkan dukungan penuh dari orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya. Program (1) diinisiasi oleh pihak sekolah, (2) dirundingkan dan mendapat penguatan bersama/dari komite sekolah. Setelah ada kesepakatan antara sekolah dan komite sekolah, barulah komite sekolah (3) mengajak semua wali murid untuk rapat awal tahun, guna mendapatkan dukungan tentang program sekolah dari komite sekolah.

Strategi Penguatan Pelibatan Partisipasi Masyarakat pada **Evaluasi Kinerja**, antara lain meliputi: (1) pelibatan masyarakat pada evaluasi kinerja tri-wulan-1; (2) memantau laporan kemajuan pelaksanaan program tri-wulan-1; (3) pelibatan masyarakat pada evaluasi kinerja tri-wulan-2 dan semester-1; (4) memantau laporan kemajuan pelaksanaan program tri-wulan-2 (semester-1); (5) pelibatan masyarakat pada evaluasi kinerja tri-wulan-3 melalui memantau laporan kemajuan pelaksanaan program tri-wulan-3; (6) pelibatan masyarakat pada evaluasi kinerja tri-wulan-4, semester-2, dan tahun-1 dengan cara memantau laporan kemajuan pelaksanaan program tri-wulan-4, laporan semester-2, dan laporan tahunan.

Kepala SMPN 1 Merigi menyatakan bahwa laporan kemajuan dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi kinerja. Jika ada media untuk mempublikasikan laporan kemajuan dangan baik maka akan segera terdeteksi mana kegiatan yang sudah tercapai dan mana kegiatan yang belum tercapai. Berkat informasi itu, kemanjuan setiap program yang dijalankan. Arahkan kembali jika ada pekerjaan yang menyimpang arah, atau perkuat dorongan untuk segera berpastidipasi ataupun memenuhi kewajiban mereka.

5). Implementasi Penguatan Partisipasi Masyarakat

Kepala SMPN 1 Merigi menyatakan bahwa implementasi penguatan partisipasi masyarakat banyak ditentukan (1) keberhasilan dalam perencanaan dan rapat awal tahun; (2) pemantauan dan laporan kemajuan pada setiap tahapannya, dan (3) laporan keberhasilan dan pengkomunikasian atas hasil-hasil dari setiap program yang dijalankan. Sukses suatu program akan menuai sukses pada program lainnya, yang didasari oleh adanya kepercayaan.

6). Tindak Lanjut Penguatan Pelibatan Partisipasi Masyarakat

Kepala SMPN 1 Merigi menyatakan bahwa tindak lanjut yang perlu dicermati adalah manakala suatu program mengalami kegagalan, maka kepala sekolah dan komite sekolah harus menjelaskan kepada semua pihak tentang penyebab kegagalan, dan mencari solusinya, hingga semua pihak dapat menerima, dan tidak menjadi penghalang pada program berikutnya. Apabila ada “oknum” yang dipandang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut sebaiknya dimintai pertanggungjawaban, agar kekecewaan tidak merebak ke pengurus lain yang tidak terkait dengan penyimpangan dari rencana semula. Apabila ada pengurus lama atau kepala sekolah lama meninggalkan masalah terkait dengan dana masyarakat, maka harus segera dibentuk pengurus baru, dan kepala sekolah baru segera mencari jalan untuk menghadirkan pihak-pihak terkait. Minimalisir permasalahan dengan melakukan audit secara terbuka, bukan tidak mungkin masalah yang ditinggalkan tidak sebesar yang diisukan. Jika mungkin, kondisikan untuk diadakan “islah”, agar kepala sekolah yang baru dan pengurus komite yang baru dapat menetralisir suasana, dan dapat membangun semangat baru dan harapan baru. Hal ini telah dialami oleh pergantian kepala SMPN 1 Merigi yang bertukar dengan kepala SMAN 1 Merigi. Dengan menghadirkan konsultan MBS, yang sekaligus peneliti pada penelitian ini, telah berhasil melakukan pembaharuan pengurus dan pembaharuan semangat, serta “pemaafan pada kasus lama, karena setelah dinilai kembali, sisa pekerjaan tahun lalu tidaklah terlalu banyak.

2. Hasil FGD SMPN 1 Batik Nau

a. Potensi Sekolah

1). Karakteristik Sekolah

SMPN 1 Batik Nau Berdiri di atas bukit pada ketinggian 320 m di atas permukaan laut, walaupun tidak begitu tinggi dalam ukuran (dpl), namun sekolah tersebut berada pada puncak dataran tinggi di Kecamatan Batik Nau. Di kecamatan Batik Nau sekolah ini merupakan sekolah yang pertama kali didirikan. Terletak bukan pada jalan lintas tetapi di tengah areal Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Karet. Sekolah ini mempunyai 9 ruang kelas, tetapi hanya terdapat 6 rombongan Belajar, tiap tingkat kelas terdiri dari 2 rombongan belajar, dengan jumlah murid seluruhnya sebanyak 186 orang atau rata-rata 31 orang per kelasnya. Sekolah ini seolah kurang peminat, disebabkan oleh lokasi yang berada di bukit, pedalaman, dan tidak berada dalam jalur lalu lintasan. Ruang kelas masih lebih, tetapi dimanfaatkan untuk laboratorium IPA, Perpustakaan, dan Mushola.

2). Karakteristik Lingkungan Sekitar Sekolah

SMP Negeri 1 Batik Nau berada di tengah-tengah masyarakat yang masih memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Sebagian besar (90%) warga sekitar sekolah merupakan warga pendatang (transmigran) asal pulau jawa. Yang secara sosial-ekonomi tergolong mapan (sejahtera). Sekolah ini terletak di bukit dengan tanah merah yang labil, berbeda dengan kondisi di merigi, yang terdiri dari tanah hitam yang cocok untuk ditanami sayuran. Oleh sebab itu, wilayah ini merupakan daerah pengembangan karet, dengan basis kebun milik perusahaan inti rakyat (PIR) karet Batik Nau, dengan luas lahan lebih dari 1.200 ha.

3). Keunggulan dan Kelemahan SMPN 1 Batik Nau

Keunggulan lingkungan sekolah; SMPN 1 Batik Nau memiliki keunggulan dalam (1) kerukunan penduduk, dan (2) kepercayaan terhadap pihak sekolah. Para siswa relatif “mudah dibimbing”, mendapat dukungan pengawasan yang memadai dari orang tua. Kurikulum yang diterapkan sesuai dengan keperluan masyarakat, orang tua, dan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan siswa. Sebagian guru tergolong berpengalaman dan selalu siap untuk menjalankan tugas utamanya mengajar. Hubungan

sekolah dengan orang tua siswa dan alumni sangat baik, sehingga mudah untuk diadakan kerjasama guna mendukung program sekolah, serta didukung lingkungan sekolah yang asri, sejuk dan nyaman. Suasana belajar jauh dari hiruk-pikuk lingkungan, karena di sekitar sekolah masih dedaunan hijau yang rimbun dan alami.

Kelemahan sekolah; SMPN 1 Batik Nau masih kurang guru sebanyak 7 orang. Diatisi dengan jalan mengangkat guru honorer pada mata pelajaran yang dibutuhkan. Masih ada ruang kelas yang digunakan double fungsi sebagai perpustakaan dan laboratorium. Kelengkapan alat PBM dan peralatan olah raga yang masih perlu ditingkatkan. Keberadaan sekolah yang terletak di atas bukit yang bergelombang membuat sekolah ini jadi kurang peminat. Ke sekolah ini tidak ada angkutan umum, satu-satunya alternatif yang dilakukan siswa adalah menggunakan sepeda motor. Sebagian siswa ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor.

4). Prospek Pelibatan Partisipasi Masyarakat

SMPN 1 Batik Nau memerlukan (1) optimasi beban mengajar; (2) penambahan ruang penunjang lain, karena ada dua ruang kelas yang difungsikan menjadi laboratorium dan ruang perpustakaan; (3) penambahan sarana belajar; (4) pengadaan peralatan olah raga dan sarana pembelajaran muatan lokal; serta (5) penguatan partisipasi masyarakat, kontribusi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk memenuhi keperluan pendidikan di sekolah.

b. Potensi Sosial-Budaya, Ekonomi, dan Keberagamaan masyarakat

1). Potensi Sosial-Budaya Masyarakat

Gotong royong dalam pengadaan/pemeliharaan fasilitas umum; Kebiasaan bergotong royong sudah mulai pudar, termasuk dalam upaya perbaikan atau pengadaan fasilitas umum. Kebiasaan bergotong royong sudah mulai pudar, terutama pada fasilitas umum dan aset pemerintah, hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa fasilitas umum dan aset pemerintah merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam pengadaan dan pemeliharaannya. Begitu pula dalam pengadaan dan perbaikan jalan, jembatan, siring, dan fasilitas sekolah. Yang masih “baik” kondisinya dalam bergotong royong

memperbaiki fasilitas ibadah, seperti mesjid dan mushola. Kegotongroyongan dalam pembangunan dan pemeliharaan mesjid dan mushola disebabkan oleh persepsi tentang nilai ibadahnya yang lebih tinggi, karena dianggap amal-ibadah yang berhubungan langsung dengan konsep ibadah terhadap Allah, dan berharap mendapat balasan “duniakhairat”. Sementara dalam pemeliharaan fasilitas umum lainnya seolah dianggap hanya untuk kepentingan “duniawi”.

Gotong royong dalam acara/pekerjaan keluarga; Kebiasaan bergotong royong dalam pekerjaan keluarga, khususnya dalam pembangunan rumah, pengeraian lahan (kebun, sawah, dan ladang), hajatan, kemalangan, dan kematian masih sangat rukun dan terpelihara. Jika membangun rumah anggota keluarga dan tetangga biasa bertukar alokasi waktu dan tenaga untuk saling membantu, bahkan seringkali, meminjamkan bahan kepada keluarga yang sedang membangun dan berjanji untuk dibayar dengan barang yang senilai pada saat yang meminjami akan melaksanakan pembangunan. Selain itu, mereka juga selalu bergotong royong jika ada hajatan, kematian, atau pada saat penanganan pasca bencana.

2). Kerukunan bertetangga dan kepedulian terhadap lingkungan

Dalam hal kerukunan bertetangga dan kepedulian terhadap lingkungan masih “guyub”, masyarakat antar tetangga pada umumnya mengenal satu dengan yang lainnya, dan mudah untuk dikumpulkan guna suatu keperluan. Tetapi tampak kasat mata mereka seperti sibuk dengan urusan masing-masing. Peneliti berpandangan bahwa hal itu disebabkan oleh media pertemuan yang kurang, dan even-evennya juga kurang, kekurangan ini disebabkan oleh pandangan akan perlunya jamuan dalam setiap acara perkumpulan. Kegiatan tersebut juga tergeser oleh kehadiran acara televisi yang menyajikan banyak pilihan.

3). Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Kebiasaan menjaga keamanan lingkungan; Secara umum pelaksanaan siskamling mulai “pudar”, namun dalam setahun terakhir pemda memotivasi untuk menggiatkan kembali kegiatan “ronda”, dengan jalam membangun “Pos Ronda” di setiap kelurahan atau bahkan di setiap dusun. Setiap keluarga, wajib bertugas semalam

dalam seminggu, dan setiap malam ditugaskan sekitar 4-5 orang untuk piket “mengamankan lingkungan”. Keluarga yang berhalangan atau “enggan” menjalankan tugas tersebut, dikenakan kewajiban membayar pengganti dimana tugasnya akan digantikan oleh petugas yang secara khusus akan mengantikannya.

Ketertiban Lingkungan; Penataan ketertiban lingkungan pada umumnya dilakukan melalui program pemerintah. Beberapa dusun pada saat ini sedang melaksanakan PNPM (program nasional pembangunan mandiri). Penataan lingkungan menjadi bagian dari kegiatan pengembangan wilayah, dananya bersumber dari bantuan luar negeri, seperti: Aus-Aid, US-Aid, Bank Dunia ataupun Bank Pembangunan (ADB). Sementara itu, kegiatan penataan lingkungan yang berbasis aktivitas masyarakat pada saat ini “hampir punah”. Karena mereka selalu mengandalkan proyek, dan bantuan. Mungkin terlatih dengan adanya bantuan pasca bencana.

4). Kesenian dan kebudayaan

Kesenian dan budaya setempat; Seni dan budaya setempat di Batik Nau, hanya tinggal “rebana” yang dibudayakan. Rebana dimanfaatkan pada acara adat mengiringi acara pernikahan, dan acara peringatan hari-hari besar keagamaan. Itupun pada umumnya dilakukan oleh kaum “Usia lanjut”. Sedangkan kaum mudanya nampak tidak minat lagi untuk mengembangkan seni budaya tersebut. Peluang muncul manakala pihak sekolah (guru kesenian) mengambil inisiatif untuk meremajakan seni rebana, ataupun kesenian lain yang berakar dari budaya masyarakat lokal.

5). Keterampilan khusus khas daerah

Di Kabupaten Bengkulu Utara khususnya di Kecamatan Batik Nau, tiada kerajinan khusus orang tua atau masyarakat guna menunjang ekonomi keluarga. Semua potensi ekonomi bergantung pada hasil pertanian. Ada wacana, dari pihak PIR mau membantu masyarakat melalji sekolah untuk dapat menghasilkan tanaman karet yang lebih baik dengan jalan memberikan pelatihan khusus tentang tata cara budidaya karet, khususnya pada pembibitan, dan pemeliharaan agar karet lebih cepat verproduksi dengan hasil yang optimal. Sekolah menanggapi peluang itu dengan jalan akan mengintegrasikan pelajaran biologi, dengan memberi muatan lokal pembudidayaan

(penyemaian, stek, dan pemeliharaan, agar tanaman menjadi lebih cepat berproduksi, dengan hasil yang memuaskan, seperti karet yang ada di kebun inti. (Akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya).

c. Potensi Ekonomi Masyarakat Batik Nau

1). Sumber Penghasilan Keluarga

Penghasilan utama masyarakat di Kecamatan Batik Nau berasal dari pekebun karet, tanaman penyela tahunan dan palawija. Selain itu ada dua komoditas baru yang direkomendasikan untuk ditanam secsawah tahan hujan. Andalan utama penduduk adalah berafiliasi dengan PIR Karet. Pegawai PIR bergaji pokok Rp. 1.200.000,- bulan. Selain bekerja di PIR banyak penduduk yang mengarap kebun karet sendiri, baik dalam pola plasma dari inti rakyat, maupun tanaman sendiri. Hasil karet warga tidak mampu terserap semua oleh PIR, oleh sebab itu pula harga karet di PIR seringkali lebih rendah dibanding di jual pada tengkulak atau pabrik lain. Tetapi warga, baik anggota PIR ataupun bukan anggota PIR boleh menjual karetnya ke luar, kecuali karet kebun inti, seluruhnya diolah oleh PIR. Bila memasuki musim paceklik ataupun pekerjaan dan kebun keluarga kurang produktif, penduduk punya alternatif untuk menjadi tenaga harian lepas di PIR, dengan upah Rp. 40.000,- per hari. Bila kebun sendiri sedang produktif (panen) mereka menggarap kebun sendiri.

Dari penghasilan utama yang diperoleh orang tua siswa diperoleh data bahwa sebanyak 30% orang tua siswa berpenghasilan antara Rp. 600.000-1.000.000,- sebanyak 44% berpenghasilan antara Rp. 1.000.000-1.500.000,- dan hanya 26% dari mereka berpenghasilan lebih dari Rp.1.500.000,-. Rata-rata penghasilan penduduk sebanyak Rp. 1.200.000,- Kehadiran PIR Karet menjadi penyangga ekonomi utama warga ketahun. Dimana pada saat kebun warga tidak produktif, warga ditampung di PIR untuk menggarap padat karya guna perbaikan dan pemeliharaan kebun inti Rakyat, seperti memupuk, memperbaiki teras-siring, dan pembersihan gulma kebun dan pohon karet.

2). Belanja keluarga

Pengeluaran biaya pendidikan; Belanja keluarga untuk pendidikan di SMPN 1 Batik Nau sebanyak Rp. 54.000.000,- per tahun. Setiap siswa mengeluarkan iuran

sebanyak Rp 300.000,- atau sekitar Rp. 25.000,- per bulan. Uang sebesar itu, pada tahun 2013 digunakan untuk pembuatan penyangga tebing jalan menuju sekolah. Pengeluaran biaya pendidikan oleh orang tua murid tersebut belum termasuk biaya yang dikeluarkan dan dibenajakan secara peribadi untuk kepentingan anak yang bersekolah di SMPN 1 Batik Nau, dan anak-anak mereka yang bersekolah di tempat lain. Di satu sisi, penghasilan orang tua sudah setara dengan upah minimum regional, di sisi lain sumbangan orang tua untuk pendidikan masih sangat minim. Oleh sebab itu, masih ada peluang untuk meningkatkan kontribusi orang tua peserta didik guna pelaksanaan program sekolah.

3). Prosentase pемbiayaan keluarga untuk pendidikan

Jika rata-rata belanja keluarga sebanyak Rp.1.200.000,- per bulan sedangkan biaya pendidikan sebanyak Rp. 25.000,- per bulan, maka pengeluaran pendidikan hanya sekitar 2% dari penghasilan orang tua siswa. Terbuka peluang pelibatan partisipasi masyarakat yang lebih besar lagi. Untuk itu, para orang tua dalam forum group discussion mengusulkan diadakannya program yang terkait dengan pembinaan karakter dan keagamaan, seperti diklat baca tulis al-quran, program penguatan ibadah dan penguatan adab/tatakrama.

d. Potensi kehidupan beragama

1). Pemeluk agama

Penduduk kabupaten Bengkulu Utara pada umumnya (95%) beragama islam, hanya 5% beragama selain islam. Pemeluk agama yang jumlahnya mayoritas berpengaruh terhadap pendidikan di sekolah, misalnya terhadap kegiatan ekstrakurikuler, seperti baca-tulis al-qur'an, ceramah agama, dan latihan beribadah. Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus mesjid, majlis taklim, ataupun lembaga keagamaan lainnya, yang berbasis pendidikan agama oleh masyarakat.

2). Kehidupan beragama

Fasilitas penunjang kehidupan beragama berupa mesjid, surau, dan majlis taklim, hampir ada di setiap dusun. Di beberapa dusun ada yang memiliki mesjid dan surau-surau yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan TPA dan TPD atau majlis taklim

untuk anak-anak, remaja, kaum bapak, dan kaum ibu. Program SMPN 1 Batik Nau yang dapat digunakan untuk pelibatan partisipasi masyarakat pekebun sebagai model intervensi penguatan pelibatan partisipasi masyarakat. Dalam kasat mata, kehidupan keagamaannya masih jauh dari harapan. Kebanyakan islam tertuang hanya di KTP, implementasinya pmasih perlu perjuangan agar bisa sejalan antara pengurus yang satu dengan yang lainnya.

e. Program Rutin dan Operasional Sekolah

Program rutin dan operasional utama (intra kurikuler) SMPN 1 Batik Nau. SMPN 1 Batik Nau memiliki program rutin dan operasional utama yang dibuat dalam bentuk rencana kerja sekolah tahun 2013 yang kegiatannya disusun menurut kalender akademik yang dikelurakan oleh pihak sekolah ataupun pihak Dinas pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam pelaksanaan pembelajaran banyak hal yang dapat melibatkan orang tua murid, masyarakat, dan dunia usaha. Namun demikian sekolah ini belum banyak melibatkan pihak-pihak terkait. Hal ini disebabkan oleh sulitnya melaksanakan kerjasama yang terintegrasi dengan kegiatan utama sekolah, terutama karena kesiapan guru untuk melibatkan pihak lain yang belum terlatih.

f. Program rutin dan operasional penunjang (ekstra kurikuler)

Pada pelaksanaan program ekstra-kurikuler lebih banyak peluang untuk dapat melaksanakan pelibatan partisipasi masyarakat, terutama pada kegiatan ekstra dalam bentuk keterampilan, keahlian, dan paket-paket khusus seperti pembelajaran muatan lokal. Keunggulan lokal dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dapat dijadikan sebagai mitra dalam menerapkan keterampilan dan membudayakan keahlian bagi generasi yang akan datang. Perlu ditindak lanjuti tawaran pihak PIR yang bersedia mengadakan pelatihan pembudidayaan karet, agar siswa terampil membudi dayakan karet unggul. Jika siswa dapat melakukan hal ini, maka dipastikan mereka dapat melakukan peremajaan tanaman karet keluarga mereka secara lebih efisien dan produktif.

g. Rencana Pengembangan SMPN 1 Batik Nau

1). Rencana pengembangan sekolah (RPS)

Rencana pengembangan SMPN 1 Batik Nau sesungguhnya sudah komprehensif, namun pengembangannya kurang sistematis, belum tersaji secara gradual. Sehingga terkesan bahwa kegiatan pengembangan sekolah merupakan kegiatan yang tidak terintegrasi. Secara teoritik-praktis SMPN 1 Batik Nau menggunakan RPS sebagai acuan untuk melaksanakan pengembangan sekolah, namun secara dokumentasi tidak lengkap, nampak tidak saling terkait, dan kurang tersistem. Tahun ini mau melakukan apa, yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu apa saja, dan yang akan dilakukan tahun-tahun yang akan datang apa saja. Mana yang prioritas, mana yang belum prioritas. Praktisnya, setiap tahun (awal tahun) mereka menyusun rencana, membahasnya dan menyepakatinya melalui rapat antara pihak sekolah dengan komite sekolah dan masyarakat.

2). Program Insidental SMPN 1 Batik Nau

Pembangunan sarana fisik di SMPN 1 Batik Nau; Pembangunan fisik dari pemerintah terbatas, seringkali berupa paket-paket, yang diperlukan tidak tersedia, yang tak diperlukan tersedia, sehingga kebutuhan tetap ada dan program tidak terserap. Bantuan masyarakat termasuk banyak, karena setiap tahun selalu ada program pembangunan fisik yang dilaksanakan. Perencanaannya dibuat setiap awal tahun, bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru untuk menggali partisipasi masyarakat. Cara ini memang cukup efektif dalam menghadirkan suatu, atau ada beberapa kegiatan yang didanai oleh komite sekolah. Beberapa bangunan fisik yang telah disumbang oleh masyarakat antara lain: (1) pembangunan mushola; (2) pembangunan pagar sekolah; (3) pembuatan lapangan upacara dan olah raga; serta (4) perbaikan kamar mandi dan *water closet*.

3). Pengadaan alat/bahan keperluan pembelajaran dan penunjang

Pengadaan alat/bahan untuk keperluan pembelajaran pada umumnya telah cukup dengan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah. Tetapi ada beberapa jenis barang yang baru boleh dibeli setelah semua komponen keperluan pembelajaran

terpenuhi. Oleh sebab itu, kepala SMPN 1 Batik Nau juga telah berhasil membeli alat-alat yang dananya bersumber dari orang tua siswa dan masyarakat melalui komite sekolah. Beberapa diantaranya adalah (1) pembelian 20 unit komputer untuk kepentingan laboratorium; (2) pembelian in-fokus; (3) pembelian gordeng; dan (4) pengadaan papan tulis (white-board).

4). Kegiatan pemenuhan kriteria akreditasi dan peningkatan mutu

Seperti tersurat dalam hasil akreditasi, bahwa SMPN 1 Batik Nau baru mendapat nilai akreditasi C, ini menandakan bahwa sesungguhnya banyak komponen input pembelajaran masih banyak yang belum memadai dan memerlukan pemenuhan yang segera, sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertuang dalam rekomendasi atas hasil akreditasi sekolah atau ketika menyusun evaluasi diri sekolah (EDS).

h. Standar Prosedur Pelibatan Partisipasi Masyarakat (SP3M) Bagi Sekolah

Setelah wawancara, studi dokumentasi, dan observasi di SMPN 1 Batik Nau diperoleh informasi bahwa telah memiliki kelengkapan dokumen sekolah antara lain meliputi: (1) Visi, misi, dan strategi sekolah, (2) profil sekolah , (3) rencana pengembangan sekolah, (4) rencana kerja tahunan, (5) laporan tahunan, (6) laporan kinerja tahunan sekolah, (7) rencana kerja kepala sekolah dan guru-guru, serta (8). laporan kinerja masa jabatan kepala sekolah. Bukti fisik atas dokumen sekolah sebagaimana dimaksud telah tersedia, dan ada tiga hal yang belum tersedia, antara lain berupa laporan semester, laporan kinerja tahunan, dan laporan kinerja masa jabatan kepala sekolah. Setelah ditanya lebih jauh, memang tidak ada pihak yang meminta dari atasan atas laporan-laporan tersebut. Laporan kinerja hanya dibuat secara parsial oleh masing-masing kepanitiaan, dokumentasi lengkapnya ada pada panitia adhoc, kepala sekolah hanya menyimpan kopy laporan yang dianggap penting dan sering ditanyakan oleh pengawas pembina, dan petugas monitoring evaluasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten.

1). Standar Proses Penyiapan dan Pengembangan

Setelah dilakukan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, diperoleh informasi atau data dalam penyiapan dokumen, antara lain sebagai berikut;

- a). Penyusunan dan pelembagaan visi, misi, dan strategi sekolah kurang sistematis dan tidak prosedural.
 - b). Updating profil sekolah dalam laporan tahunan/semesteran dibuat secara insidental.
 - c). Penyusunan dan adaptasi RPS dilaksanakan pada tiap awal tahun
 - d). Penyusunan dan adaptasi RKS tahunan, juga diaksanakan pada tiap awal tahun.
 - e). Laporan kinerja tahunan, semesteran, dan 4 tahunan belum dibuat karena tidak ada permintaan dari pihak Dinas.
- 2). Standar Prosedur Pelibatan Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Sekolah, antara lain meliputi:
- a) Latar Belakang Perlunya Penguatan Partisipasi Masyarakat
Kepala SMPN 1 Batik Nau menyatakan bahwa “sangat diperlukan adanya kerjasama dengan pihak masyarakat guna percepatan peningkatan mutu pembelajaran”. Alasan tersebut perlu dilengkapi dengan fakta dan data, kemudian digunakan untuk menyusun program pelibatan partisipasi masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan realisasi pelibatan partisipasi tahun sebelumnya menjadi salah satu penyebab keberhasilan program berikutnya. Pengalaman menurunnya partisipasi disebabkan oleh **“kurangnya komunikasi dan transparansi”** dalam pengelolaan partisipasi.
 - b) Tujuan Penguatan Partisipasi Masyarakat
Kepala SMPN 1 Batik Nau menyatakan bahwa setiap harapan pihak sekolah dikemas dalam bentuk program, dan setiap program berbasiskan tujuan. Berdasarkan kejelasan tujuan, kemanfaatan yang pasti, maka para orang tua dan masyarakat, yang dimotori oleh pengurus komite sekolah mendukung terealisasinya program tersebut. Dukungan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, dapat berupa: dana, tenaga, pandangan, atau keterlibatan langsung dalam program yang ditawarkan.
 - c) Hasil yang diharapkan
Kepala SMPN 1 Batik Nau menyatakan bahwa apabila hasil yang diharapkan dapat terwujud, pihak sekolah merasa puas dan dapat mengambil manfaat atas

peran partisipasi masyarakat, maka keberhasilan program tersebut memiliki nilai tambah guna mensukseskan program berikutnya. Sebaliknya, apabila gagal, maka program berikutnya akan gagal pula, karena orang tua dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan tidak mau berpartisipasi lagi.

3). Strategi Penguatan Pelibatan Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan Program

- a) Pelibatan masyarakat diawali pada perencanaan awal tahun
- b) Inisiasi usulan program oleh warga sekolah, terutama kepala sekolah
- c) Kepala sekolah bernegosiasi dengan pengurus inti komite sekolah
- d) Rapat komite sekolah dan orang tua murid guna menyepakati dan meluncurkan program tahunan
- e) Penetapan kesepakatan program bantuan tahun-1
- f) Pembahasan tentang bentuk-bentuk bantuan dan teknik pengadaannya
- g) Teknik pelibatan peran serta masyarakat dalam pemberian bantuan
- h) Teknik pemantauan kemajuan pelaksanaan program.

Kepala SMPN 1 Batik Nau menyatakan bahwa pelibatan masyarakat pada tahap perencanaan kegiatan menjadi langkah sukses pertama. Jika pandai mengemasnya, maka pihak sekolah dan komite sekolah akan mendapatkan dukungan penuh dari orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya. Program (1) diinisiasi oleh pihak sekolah, (2) dirundingkan dan mendapat penguatan bersama/dari komite sekolah. Setelah ada kesepakatan antara sekolah dan komite sekolah, barulah komite sekolah (3) mengajak semua wali murid untuk rapat awal tahun, guna mendapatkan dukungan tentang program sekolah dari komite sekolah.

4). Strategi Penguatan Pelibatan Partisipasi Masyarakat pada Evaluasi Kinerja, antara lain meliputi:

- a) Pelibatan masyarakat pada evaluasi kinerja tri-wulan-1
Memantau laporan kemajuan pelaksanaan program tri-wulan-1
- b) Pelibatan masyarakat pada evaluasi kinerja tri-wulan-2 dan semester-1
Memantau laporan kemajuan pelaksanaan program tri-wulan-2 (semester-1)
- c) Pelibatan masyarakat pada evaluasi kinerja tri-wulan-3
Memantau laporan kemajuan pelaksanaan program tri-wulan-3
- d) Pelibatan masyarakat pada evaluasi kinerja tri-wulan-4, semester-2, tahun-1

- e) Memantau laporan kemajuan pelaksanaan program tri-wulan-4, laporan semester-2, dan laporan tahunan.

Kepala SMPN 1 Batik Nau menyatakan bahwa laporan kemajuan dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi kinerja. Jika ada media untuk mempublikasikan laporan kemajuan dangan baik maka akan segera terdeteksi mana kegiatan yang sudah tercapai dan mana kegiatan yang belum tercapai. Berkat informasi itu, kemanjuran setiap program yang dijalankan. Arahkan kembali jika ada pekerjaan yang menyimpang arah, atau perkuat dorongan untuk segera berpastidipasi ataupun memenuhi kewajiban mereka.

5). Implementasi Penguatan Partisipasi Masyarakat

Kepala SMPN 1 Batik Nau menyatakan bahwa implementasi penguatan partisipasi masyarakat banyak ditentukan (1) keberhasilan dalam perencanaan dan rapat awal tahun; (2) pemantauan dan laporan kemajuan pada setiap tahapannya, dan (3) laporan keberhasilan dan pengkomunikasian atas hasil-hasil dari setiap program yang dijalankan. Sukses suatu program akan menuai sukses pada program lainnya, yang didasari oleh adanya kepercayaan.

6). Tindak Lanjut Penguatan Pelibatan Partisipasi Masyarakat

Kepala SMPN 1 Batik Nau menyatakan bahwa tindak lanjut yang perlu dicermati adalah manakala suatu program mengalami kegagalan, maka kepala sekolah dan komite sekolah harus menjelaskan kepada semua pihak tentang penyebab kegagalan, dan mencari solusinya, hingga semua pihak dapat menerima, dan tidak menjadi penghalang pada program berikutnya. Apabila ada “oknum” yang dipandang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut sebaiknya dimintai pertanggungjawaban, agar kekecewaan tidak merebak ke pengurus lain yang tidak terkait dengan penyimpangan dari rencana semula.

3. Hasil FGD SMPN 1 Sindang Kelingi

a. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : SMPN 1 Sindang Kelingi
Desa/Kelurahan : Sindang Kelingi
Kecamatan : Sindang Kelingi
Kabupaten : Rejang Lebong
Kepala Sekolah : Yeni Minarni, S.Pd.

b. Data Dasar Sekolah

KELAS	ROMBEL	SISWA		
		L	P	JML
VII	4	56	62	118
VIII	4	61	85	146
IX	4	65	75	140
TOTAL	12	182	222	404

GURU	Kelamin		Jumlah
	L	P	
GT/PNS	7	4	11
GTT	5	12	17
Guru Bantu	0	0	0
TOTAL	12	16	28

c. Waktu Belajar

Semua Rombongan belajar belajar pada pagi hari, sore harinya digunakan untuk kegiatan ekstra-kurikuler.

d. Dokumen Sekolah

Sekolah memiliki semua dokumen yang diperlukan, walaupun secara kualitas dan akurasinya masih perlu direvisi. Beberapa diantara dokumen yang ada antara lain: profil sekolah, rencana pengembangan sekolah, rencana kerja sekolah, rencana kerja guru dan tenaga administrasi sekolah, laporan kinerja guru dan tenaga administrasi sekolah, laporan bulanan, laporan semester/tahunan, dan laporan kinerja sekolah 4-tahunan.

e. Program Prioritas Sekolah

Sekolah memiliki program prioritas dalam bidang peningkatan prestasi akademik, berupa pembinaan tim olimpiade sains. Peningkatan prestasi non-akademik berupa pembinaan olah raga prestasi. Kegiatan ekstrakurikuler berupa pembinaan kelompok marching-band, olah raga prestasi, peningkatan IMTAQ, olimpiade sains nasional, usaha kesehatan sekolah, pramuka, olimpiade olah raga dan seni nasional. Sedangkan

dalam bidang pembangunan sarana pembelajaran berupa pembangunan aula, areka kegiatan out-dor, dan pembangunan mushalla sebagai sarana peningkatan IMTAQ.

f. Dukungan Masyarakat Terhadap Program Sekolah

Dukungan masyarakat terhadap program sekolah cukup kondusif, bukti dukungan antara lain atas kehadiran komite sekolah sebanyak yang diundang semuanya memenuhi undangan, walaupun ada diantaranya diwakili oleh kakak kandung dan nenek kandung dari siswa ybs, tetapi semuanya mengerti maksud kehadiran dan partisipasinya untuk kemajuan pendidikan. Bentuk dukungan masyarakat antara lain berupa: (1) sumbangan sukarela dari wali murid dan dukungan kepada siswa untuk menyisihkan uang jajan mereka sebanyak 500 rupiah setiap hari untuk infak; (2) sumbangan sarana sekolah berupa tempat parkir, mushalla, aula, peralatanan drum-band, pagar keliling sekolah, dan kursi siswa. Tenaga yang mengerjakan sarana fisi sekolah berasal dari wali murid yang memiliki keahlian.

g. Strategi Pelibatan Partisipasi Masyarakat

- 1) Perencanaan kegiatan dilaksanakan secara bertahap, pada awalnya kepala sekolah dan ketua komite sekolah merumuskan rencana dan strategi implemen-tasinya, lalu diundang pengurus inti untuk membahas rencana yang dimaksud, setelah disepakati oleh tim inti baru menghadirkan semua orang tua siswa untuk dibahas bersama dan disepakati bersama.
- 2) Implementasi program sesuai dengan hasil kesepakatana bersama tentang apa yang akan dilaksanakan, siapa saja yang terlibat untuk melaksanakannya, berapa biayanya, darimana sumbernya, serta bagaimana menghimpun dan memanfaatkannya.
- 3) Pengawasan dan pengendalian kegiatan dilaksanakan secara kooperatif antara sekolah dan komite sekoah, laporan kemajuan diadakan pada rapat tengah tahunan, sedangkan penilaian keberhasilannya dilakukan pada akhir tahun ajaran.
- 4) Partisipasi masyarakat telah menunjukkan bukti berupa wujudnya fisik yang direncakan dan keberhasilan yang diraih atas pemanfaatan penggunaan fasilitas yang diadakan. Fasilitas fisik berupa tempat parkir, aula, alat *drum-band*, kursi,

dan yang sedang berjalan adalah pembangunan mushala. Sedangkan prestasi yang diraih antara lain mendapat juara *masching-band* se Kabupaten Rejang Lebong, dan juara mayoret terbaik tingkat SMP. (Curup, 25-10-2013, Yeni Minarni, S.Pd.)

h. Partisipan Anggota Masyarakat Dalam Focus Group Discussion

Peserta FGD yang berasal dari perwakilan orang tua/wali murid berjumlah 36 orang, pada umumnya bekerja sebagai **petani**. Berpenghasilan rata-rata kurang dari 1 juta rupiah. Mereka telah berpartisipasi dalam pembangunan musola pada tahun 2013/2014, telah berhasil mewujudkan harapan siswa memiliki tim dan alat drum-band pada tahun 2012/2013 lalu, serta berhasil membangun aula dan membeli kursi siswa pada tahun sebelumnya. Untuk pembelian kursi mereka iuran sebanyak 50.000 rupiah persiswa.

i. Kesan Berpartisipasi

Orang tua/wali murid merasa bangga telah dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka di sekolah. Mereka percaya dan mendukung karena perencanaan, pengadaan, dan kegiatan dilaksanakan secara terbuka, aspiratif, partisipatif, dan adil, karena iuran dikenakan pada orang tua siswa yang mampu saja. Mereka menyatakan akan mendukung kegiatan sejenis demi kebaikan sekolah di masa yang akan datang. Partisipasi yang dibangun tidak dinilai membebani mereka.

j. Penghasilan Keluarga dan Pemanfaatannya

Penghasilan keluarga rata-rata di bawah 1 juta rupiah atau dibawah upah minimum regional provinsi Bengkulu, tidak menyurutkan mereka untuk iuran dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Penghasilan tersebut secara umum 50% digunakan untuk pangan keluarga, 10% perawatan rumah, 10% transportasi dan kredit motor, 10% keperluan sekolah (seragam, transpot, jajan, buku), 10% biaya listrik, dan 10% untuk biaya lain-lain.

k. Budaya, Seni, dan Kerajinan

- 1) Budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat masih berlangsung baik, nampak pada acara hajatan keluarga, koperasi, arisan, ronda atau siskamling, dan lainnya.
- 2) Dalam hal seni budaya mereka berpendapat bahwa seni budaya lembak sebenarnya ada yang patut dilestarikan seperti tari-tarian daerah lembak yang sudah jarang diadakan, sebaiknya diangkat lagi melalui kegiatan ekstra kurikuler di sekolah.
- 3) Dalam hal kerajinan produksi yang potensial adalah mengembangkan keterampilan dalam pemanfaatan lahan sekolah yang cukup luas dan potensial, atau budidaya tanaman dalam pot, dan penanganan pasca panen. Hal ini akan menumbuhkan sikap wirausaha pada anak, dan akan mendukung sosial ekonomi di wilayahnya. Mereka memandang bahwa pertanian potensial untuk menhadirkan kesejahteraan warga masyarakat (Wali Siswa, Curup, 25 Oktober 2013).

k. Siswa Partisipan FGD

Partisipan dari kelompok siswa dalam FGD diwakili oleh ketua kelas masing-masing, ada 12 orang kelas di sekolah ini, tiap jenjangnya ada 4 kelas, masing-masing satu kelas unggul dan 3 kelas biasa.

I. Pengalaman Siswa Berpartisipasi

- 1) Tahun 2013/2014 (sedang berlangsung) pembangunan musola yang akan dijadikan tempat fasilitas ibadah dan pembinaan IMTAQ bagi siswa, mereka sepakat untuk menyumbang 3000 rupiah setiap minggunya atau 500 rupiah setiap harinya menyisihkan uang jajan untuk dikumpulkan guna membangun musala.
- 2) Tahun 2012/2013 (tahun lalu) telah berhasil membeli peralatan drum-band, dengan iuran Rp 50.000,- setiap siswa dan dibayar tunai. Terbukti, setelah memiliki drum-band siswa merasa lebih bangga terhadap sekolahnya, dan apalagi setelah tim marching band berhasil mempersembahkan kejuaraan dalam

bidang ini, dan bisa mengalahkan sekolah-sekolah top yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

- 3) Tahun 2011/2012 (dua tahun lalu) orang tua/wali siswa telah menyumbangkan dana rata-rata sebanyak 50.000 rupiah setiap siswanya untuk kepentingan pembelian kursi siswa, karena banyak kursi siswa yang tidak layak pakai, atau berbahaya untuk digunakan. Dengan sumbangan ini para siswa dapat duduk di kursi dengan aman dan nyaman.

m. Kesan Partisipatif Siswa

Kami senang dan bangga dapat membantu menciptakan sekolah jadi lebih baik, perencanaan dan pelaksanaan perbaikan kondisi sekolah dilakukan secara terbuka, aspiratif, dan sukarela. Pungutan juga dilakukan secara adil, dimana anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak dikenakan iuran. Tak banyak siswa yang mersa keberatan, bahkan seluruh wakil siswa menyatakan bahwa akan mendukung kegiatan sejenis yang akan diadakan di tahun-tahun yang akan datang.

d. Best Practices Partisipasi Masyarakat di Beberapa Sekolah

Pengalaman adalah guru yang amat berharga, demikian juga pengalaman dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Jangan katakan bahwa orang tua murid dan masyarakat tidak mau peduli terhadap pendidikan anak-anak di sekolah. Ada potensi yang besar apabila sekolah dapat menggalinya dengan baik, menanamkan kepercayaan (amanah) dan melibatkan mereka pada setiap kerja-kerja sekolah, yang mereka perlukan adalah “transparansi” dan kejujuran. Apabila transparansi dan kejujuran terpelihara, maka kepedulian orang tua dan masyarakat terhadap persoalan sekolah akan ada solusi yang luar biasa. Berikut adalah beberapa pengalaman sekolah yang telah berhasil menggali partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan peningkatan mutu sekolah, baik dalam bentuk penataan, pembangunan, dan pemeliharaan fisik sekolah, maupun dalam hal peningkatan mutu pembelajaran. Diharapkan penyajian pengalaman keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain untuk menggalang keberhasilan yang sama atau yang lebih baik.

a. Best Practices di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, dan Seluma

Partisipasi (1)	: Pengadaan Mikro-bus Sekolah
Sekolah	: SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan
Tujuan	: Mendukung aktivitas prestatif sekolah
Keperluan Biaya	: Rp. 255.000.000,-
Sumber Biaya	: Orang tua Peserta Didik
Bentuk Partisipasi	: Pembiayaan, Pembelian, Penjemputan Kendaraan
Besar sumbangan	: Kelas 10 = 500 rb/siswa; Kelas 11 = 400 rb/Siswa; dan Kelas 12 = 300 rb/siswa. Orang tua siswa yang tak mampu tidak dikutip sumbangan.
Teknik Membayar	: 3 x bayar (dalam 1 semester), banyak yang bayar 1x cash.
Pelaksanaan	: Sosialisasi program dan penawaran oleh pengurus komite sekolah, pengumpulan dana oleh tim yang ditunjuk dalam rapat, pembeilian mikro-bus, pengurusan surat-surat, dan penjemputan mikro-bus ke Jakarta.
 Partisipasi (2)	
Sekolah	: SDN 125 Kabupaten Seluma
Tujuan	: Mendukung penciptaan ketertiban siswa dan keamanan
Keperluan Biaya	: Rp. 20.000.000,-
Sumber Biaya	: Orang tua Peserta Didik
Bentuk Partisipasi	: Pembiayaan pembelian bahan dan upah penggerjaan
Terhimpun dana	: - bantuan murid 125 x Rp.100.000 = Rp. 12.500.000,- - Bantuan PT Sawit 50 sak semen = Rp. 3.000.000,- - Bantuan alumni dan guru-guru sekolah Rp. 2.000.000,- Total dana terhimpun Rp.17.500.000,- terdapat kekurangan dana Rp. 2.500.000,- dipenuhi dari dana BOS.
Teknik pembayaran	: di angsur selama 1 semester, wali murid yang tidak mampu secara ekonomis diberi kesempatan berpartisipasi menyumbang tenaga, atau diminta untuk menjadi tenaga kerja

Pelaksanaan kegiatan : Rapat sosialisasi program dan penawaran kegiatan oleh komite sekolah, pengumpulan dana dan pelaksanaan pembangunan oleh tim yang ditunjuk, pelaksana pekerjaan oleh tim yang ditunjuk, utamakan partisipasi orang tua atau warga sekitar sekolah.

Partisipasi (3) : Pembangunan Listrik Mikro Hidro dan Pengadaan Buku-Buku
Sekolah : SD Negeri 1 Girinanto, Kabupaten Seluma
Tujuan : Menunjang kelancaran dan peningkatan kualitas pembelajaran
Keperluan : Pembangunan listrik dengan biaya Rp.132.000.000,-
 Pengadaan Buku-buku seharga Rp.15.000.000,-
Sumber Biaya : Sumbangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pelaksanaan : Rapat antara kepala sekolah, komite dan kepala desa untuk mengajukan surat ke Bupati, Gubernur dan lembaga-lembaga terkait.
 Selama 3 tahun surat tersebut mendapat respon dari pihak LIPI,
 sehingga mendapat bantuan mikro hidro sebesar 20 KVA yang
 dapat menerangi satu kampung dan juga sekolah, serta mendapat
 bantuan buku-buku untuk perpustakaan sekolah.

Partisipasi (4)	: Pembangunan Gedung Lab. IPA dan Lab. Bahasa
Sekolah	: SMP Negeri 7 Seluma
Tujuan	: Mendukung aktivitas prestatif sekolah
Keperluan Biaya	: Rp. 164.000.000,-
Sumber Biaya	: LIPI (Lembaga), Komite sekolah dan tokoh masyarakat.
Bentuk Partisipasi	: Pembiayaan pembelian bahan dan upah penggerjaan
Terhimpun dana	: Rp.30.000.000.- dari masyarakat dan perusahaan sawit.
Pelaksanaan Kegiatan	: Rapat koordinasi antara pihak sekolah dan komite sehingga mendapatkan gagasan untuk membuat proposal kepada perusahaan PTPN dengan pengajuan dana Rp.65.000.000,- dari proposal tersebut disetujui dana Rp.30.000.000,- dari PTPN untuk pembuatan gedung lab. IPA dan lab. Bahasa.

Partisipasi (5)	: Pembangunan lapangan <i>volley ball</i>
Sekolah	: SD Negeri 1 Kaur Tengah
Tujuan	: Mendukung kelancaran PBM dan kegiatan ekstrakurikuler
Keperluan Biaya	: Rp. 10.000.000,-
Sumber Biaya	: Orang tua peserta didik dan warga sekitar sekolah
Bentuk Partisipasi	: Pembiayaan pembelian bahan dan upah penggerjaan Jumlah murid = 90 orang
Terhimpun dana	: - Komite 90 x Rp.100.000,- = Rp. 9.000.000,- - Sekolah melalui pemanfatan dana BOS Rp.2.000.000,- Total dana terkumpul sebanyak Rp.11.000.000,-
Teknik Bayar	: diangsur selama 3 bulan
Pelaksanaan	: pembayaran komite yang menjadi coordinator dan pelaksana

b. Partisipasi Masyarakat di Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Kota

Partisipasi (6)	: Pembangunan Penyangga Tebing Jalan
Sekolah	: SMP Negeri 1 Batik Nau , Bengkulu Utara
Tujuan	: Mendukung aktivitas prestatif sekolah
Keperluan Biaya	: Rp. 27.000.000,-
Sumber Biaya	: Orang tua Peserta Didik
Bentuk Part	: Pembiayaan pembelian bahan dan upah penggerjaan Jumlah murid = 211 orang; Wajib Bayar = 180 orang; Bebas iuran = 31 orang
Terhimpun dana	: 180 x 300.000 Rp. 27.000.000,-
Teknik Bayar	: 12x25.000 ; 6x50.000,-; 3x100.000,- 1 x 300.000,-
Pelaksanaan kegiatan	: Rapat sosialisasi program & penawaran oleh komite sekolah, pengumpulan dana melalui petugas yang ditunjuk, dan pelaksanaan pembangunan dengan partisipasi warga, merekrut tukang, yang diutamakan diambil dari warga sekitar sekolah dan berstatus orang tua siswa.

Partisipasi (7)	: Pembuatan Lapangan <i>Volley Ball</i>
Sekolah	: SDN 1 Argamakmur , Kabupaten Bengkulu Utara
Tujuan	: Adanya lapangan volley, bulu tangkis dan sepak takraw
Keperluan Biaya	: Rp. 8.000.000,-
Sumber Biaya	: Sekolah, Wali Murid, Tokoh Masyarakat.
Bentuk Partisipasi	: Pembiayaan pembelian bahan dan upah penggerjaan Jumlah murid = 200 orang,
Terhimpun dana	: dari 200 orang tua siswa, terkumpul Rp.6.000.000,- Tokoh masyarakat menyumbang Rp.2.000.000,- sehingga Total dana seharga Rp.9.500.000,- disepakati diangsur dengan tenggang waktu 3 bulan, Rp.10.000,-/bulan.
Pelaksanaan kegiatan	: Sosialisasi program, penawaran oleh komite, pengumpulan dana, pelaksanaan pembangunan dengan partisipasi warga sekitar sekolah dan berstatus orang tua siswa.
Partisipasi (8)	: Pembangunan Pagar Sekolah (sepanjang 20 meter)
Sekolah	: SDN 6 Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara
Tujuan	: Mendukung terciptanya keamanan sekolah
Keperluan Biaya	: Rp. 7.000.000,-
Sumber Biaya	: Iuran dari siswa kelas 6 yang dikoordinir komite sekolah
Bentuk Pembiayaan	: Biaya digunakan pembelian bahan pagar beton dan upah
Terhimpun dana	: $70 \times 100.000,- = \text{Rp. } 7.000.000,-$
Teknik Bayar	: diangsur selama 6 bulan
Pelaksanaan kegiatan	: Sosialisasi program dan penawaran oleh komite sekolah, pengumpulan dana, pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan partisipasi warga sekitar sekolah.
Partisipasi (9)	: Pembangunan Pagar Sekolah
Sekolah	: SD Negeri 11 Padang Jaya
Tujuan	: Mendukung Ketertiban dan Keamanan siswa di sekolah

Keperluan Biaya	: Rp. 5.000.000,-
Sumber Biaya	: Komite (Orang tua Peserta Didik)
Bentuk Partisipasi	: Pembiayaan pembelian bahan dan upah penggerjaan Jumlah murid = 211 orang; Wajib Bayar = 180 orang; Bebas iuran sebanyak 31 orang
Terhimpun dana	: 180 x 300.000,- Rp. 27.000.000,-
Teknik iuran	: 12x25.000,- ; 6x50.000,- ; 3x100.000,- 1x 300.000,-
Pelaksanaan	: Rapat sosialisasi program & penawaran komite sekolah, pengumpulan dana dan pelaksanaan pembangunan dengan partisipasi warga sekitar sekolah, merekrut tukang, tukang diutamakan diambil dari warga sekitar sekolah dan berstatus sebagai orang tua siswa.

Partisipasi (10)

Sekolah	: SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu
Tujuan	: Mendukung kegiatan belajar sore untuk kelas XII
Keperluan Biaya	: Biaya Guru les Rp.500.000,-/bulan
Sumber Biaya	: Komite (Orang tua Peserta Didik)
Bentuk Partisipasi	: Pembiayaan dan tenaga kerja dari 200 orang peserta didik
Terhimpun dana	: 200 x 50.000,- senilai dengan Rp. 10.000.000,-/bulan
Teknik Bayar	: Bulanan, sesuai dengan
Pelaksanaan	: Wali murid yang mampu dapat membayar lebih dari lima Rp.50.000,- sedangkan wali murid yang kurang mampu dapat membayar semampunya atau bahkan tidak membayar biaya kegiatan tersebut.

Partisipasi (11)

Sekolah	: SMP Negeri 24 Kota Bengkulu
Tujuan	: Mendukung aktivitas prestatif sekolah
Keperluan Biaya	: Rp.38.000.000,-
Sumber Biaya	: Masyarakat

Bentuk Partisipasi : Pembiayaan pembelian bahan dan upah penggerjaan
 Terhimpun dana : Rp.38.000.000,-
 Teknik Bayar : Sumbangan masyarakat
 Pelaksanaan kegiatan : Rapat sosialisasi program & penawaran oleh komite sekolah, pengumpulan dana, pelaksanaan pembangunan, dan partisipasi partisipasi warga sekitar sekolah, merekrut tukang diutamakan diambil dari warga sekitar sekolah.

Partisipasi (12) : Pengecatan Dinding Sekolah dan Pembelian Gordeng
 Sekolah : SMP Negeri 2 Kota Bengkulu
 Tujuan : Menciptakan ruang belajar yang indah dan nyaman
 Keperluan Biaya : Rp.20.000.000,-
 Sumber Biaya : Orang tua Peserta Didik dan masyarakat
 Bentuk Partisipasi : Pembiayaan pembelian Cat dan Gordeng Kelas
 Terhimpun dana : Rp.25.000.000,-
 Teknik pembayaran : sesuai kemampuan mulai Rp.50.000,- sd. Rp.100.000.-
 Pelaksanaan : Sosialisasi program & penawaran oleh komite sekolah, pengumpulan dana, dan pelaksanaan pembangunan.

c. Kasus Partisipasi Masyarakat Kab. Kepahiang, Rj Lebong, dan Kota Bengkulu

Partisipasi (13) : Pembangunan Masjid

Sekolah : MIN 1 Kota Bengkulu
 Tujuan : Mendukung Kegiatan Keagamaan
 Jumlah Biaya : Rp. 250.000.000,-
 Sumber Biaya : Komite, kementerian agama, masyarakat sekitar sekolah.
 Bentuk Bantuan : Sumber dana dari Kementerian Agama digunakan untuk pembangunan pondasi dan penimbunan, dari Masyarakat membuat kotak amal yang dananya digunakan untuk pembangunan masjid dan dihitung permarggunya. Sedangkan dari pihak komite sekolah biaya Rp.150.000,-/siswa
 Terhimpun : Rp. 250.000.000,-

Teknik iuran : Sumbangan
Pelaksanaan : Rapat sosialisasi program, pengumpulan dana, dan pelaksanaan Pembangunan oleh masyarakat sekotar sekolah.

Partisipasi (14) : Pengadaan *In-Focus*

Sekolah : SDN 99 Kota Bengkulu
Tujuan : Meningkatkan prestasi siswa dan kelancaran pembelajaran
Keperluan dana : Rp. 6.000.000,-
Sumber Biaya : Orang tua Peserta Didik
Bentuk iuran : Pembiayaan pembelian *In-Focus*
Jumlah murid 76 orang
Terhimpun : $76 \times \text{Rp.}100.000,- = \text{Rp.}7.600.000,-$
Teknik Bayar : Diangsur selama 1 semester
Pelaksanaan : Rapat sosialisasi antara pihak sekolah, komite sekolah dan warga sekitar sekolah.

Partisipasi (15) : Pembangunan WC siswa

Sekolah : SMP Negeri 7 Kota Bengkulu
Tujuan : Mendukung penyediaan sarana bagi siswa
Keperluan dana : Rp. 50.000.000,-
Sumber dana : Orang tua peserta didik, dengan sumbangan Rp.100.000,-/siswa
Bentuk bantuan : Pembiayaan pembelian bahan dan upah penggerjaan
Terhimpun : Rp.57.000.000,-
Teknik iuran : 3x bayar selama 1 semester, banyak yang bayar cash.
Pelaksanaan : Sosialisasi antar komite, pengumpulan dana, pembelian bahan dan pelaksanaan pembangunan

Partisipasi (16) : Pembangunan Pelapis Tebing Sekolah

Sekolah : SD Negeri 60 Kota Bengkulu
Tujuan : Mewujudkan lingkungan sekolah yang aman
Keperluan dana : Rp.25.000.000,-

Sumber Biaya : Orang tua peserta didik, dengan sumbangan Rp.30.000/siswa
Bentuk Part : Pembiayaan pembelian bahan dan upah pengrajan
Terhimpun : Rp. 30.000.000,-
Teknik Bayar : di angsur selama 3 bulan
Pelaksanaan : Pelaksanaan pembuatan pelapis tebing sekolah dikelola komite

Partisipasi (17) : Pembangunan Pagar Sekolah dengan Swadaya Masyarakat

Sekolah : SMP Negeri 3 Bermani Ilir, Kepahiang
Tujuan : Mendukung aktivitas prestatif sekolah
Keperluan dana : Rp.2.000.000,-
Sumber dana : Komite sekolah dan swadaya masyarakat
Bentuk iuran : Pembiayaan pembelian bahan
Terhimpun : Rp. 1.000.000,- bambu dan kayu
Pelaksanaan : Rapat komite sekolah untuk meminta bantuan masyarakat dan ikut berpartisipasi (gotong royong) dalam membuat pagar.

Penyajian *best-practices* tersebut untuk menunjukkan bahwa partisipasi orang tua peserta didik masih dapat dilaksanakan, bahkan membuat pembelajaran jadi lebih kondusif, dan ada komunikasi antara sekolah dengan orang tua siswa.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Lingkungan Internal/Eksternal, Daya Dukung, dan Potensi Sekolah

a. Lingkungan Internal dan Potensi Sekolah

Sekolah merupakan salah satu lembaga yang “unik”, tak ada dua sekolah yang sama tetapi setiap sekolah berada pada satu kondisi yang potensinya berbeda-beda. Perbedaan sekolah satu dengan sekolah lainnya dinyatakan berupa profil sekolah. Begitu pula dengan hasil penelitian pada sekolah sasaran, peneliti memperoleh data dan informasi yang menunjukkan bahwa kondisi sekolah amat bervariasi. Semestinya setiap sekolah memiliki rencana strategis, rencana pengembangan, dan rencana kerja tahunan yang sistematik dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Ketika pihak sekolah ditanya soal dokumen sekolah, mereka merasa bahwa mereka telah berbuat banyak, bahkan cenderung menyelaikan pihak diknas, yang seringkali

meminta data untuk berbagai kepentingan. Tetapi ketika ditanya kelengkapan dokumennya, mereka “menghindar dalam menunjukkan bukti-bukti dokumen yang semestinya ada. Dokumen sekolah pada umumnya tidak lengkap, terutama terkait dengan dokumen perencanaan dan dokumen laporan-laporan. Mereka pada umumnya hanya fokus pada RAPBS dan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah (dalam hal ini dana BOS), tetapi soal dokumen pendukung tentang rencana perubahan dan bukti terjadinya perubahan setelah upaya dijalankan sering tidak lengkap.

Setiap warga sekolah “selalu menyatakan bahwa banyak hal yang harus ditingkatkan” terkait dengan keadaan fisik dan aktivitas di sekolah. Tetapi juga teramat banyak kendala yang menyebabkan mutu pendidikan sukar ditingkatkan. Oleh sebab itu, warga sekolah harus ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka melakukan analisis kekuatan dan kelemahan sekolah hingga dapat menemukan potensi sekolah, serta mengubah ancaman dan tantangan dari luar sistem sekolah menjadi peluang untuk menata peningkatan input, proses, dan mutu lulusan.

Keunggulan sekolah harus ditingkatkan dan dibina secara terus menerus, sedangkan kelemahan-kelemahan sekolah harus selalu diatasi hingga akar masalah terkikis habis. Kemampuan dalam menganalisis keunggulan dan kelemahan sekolah, serta kajian tentang tantangan dan peluang dari luar sistem sekolah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan. Banyak sekolah yang tidak memiliki dokumen rencana kerja yang jelas, dan kebanyakan sekolah bekerja tidak berbasis pada rencana kerja tetapi pekerjaan banyak dilakukan secara intuitif dan kepantasan perasaan. Untuk mengubah semua itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kepala sekolah dan staf sekolah lainnya secara bersama-sama dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Kepala sekolah dan sekolah lainnya yang memiliki kapasitas yang memadai, atau bahkan melebihi standar, akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah, baik dalam bentuk potensi kinerja staf, potensi sarana dan prasarana, potensi proses pendidikan, maupun potensi atas hasil yang diharapkan. Peningkatan potensi kepala sekolah dan staf menjadi prioritas dalam pengembangan sekolah, sebab faktor kepala sekolah dan staf yang profesional akan mampu melipatgandakan makna faktor-faktor potensial lain secara proporsional.

b. Daya Dukung Lingkungan Eksternal Sekolah

Kondisi lingkungan eksternal sekolah banyak mempengaruhi kondisi internal sekolah, bahkan apa yang terjadi di sekolah merupakan perwujudan dari harapan pihak luar sekolah (masyarakat), dan proses yang terjadi dalam situasi internal sekolah banyak ditentukan oleh faktor eksternal. Hal itu menunjukkan adanya kaitan yang tidak terpisahkan antara sekolah dengan masyarakat pendukungnya. Bahkan sesuai dengan perannya, sekolah pada dasarnya merupakan agen perubahan, atas perubahan yang terjadi di masyarakat.

Jika lingkungan eksternal baik, maka akan baik pula kontribusinya pada lingkungan internal sekolah. Di sekolah sasaran penelitian nampak jelas bahwa di sekolah yang komite sekolahnya tidak kondusif, tidak akan membawa manfaat bagi kemajuan sekolah, bahkan cenderung merusak program yang telah dicanangkan oleh pihak sekolah. Kemapanan ekonomi masyarakat sekitar sekolah juga tidak menjamin serta-merta akan mendatangkan makna positif bagi kemajuan sekolah. Untuk mendapatkan dukungan yang kuat dari client, sekolah harus dapat menterjemahkan harapan masyarakat akan kehadiran sekolahnya, menjadi tujuan yang harus dicapainya. Dengan begitu, sekolah akan mendapat dukungan penuh dari lingkungannya, sebab apa yang dihasilkan di akhir proses pendidikan adalah lulusan-lulusan yang sesuai dengan harapan-harapan mereka. Keberhasilan sekolah sangat bergantung pada kuatnya dukungan warga/atau kliennya.

2. Prioritas Program Pengembangan Sekolah

Semua sekolah sasaran penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan prestasi akademik merupakan program prioritas mereka, urutan kedua peningkatan prestasi non akademik, serta peningkatan prasarana dan sarana pembelajaran, di urutan ketiga peningkatan profesionalitas guru dan kepala sekolah.

a. Peningkatan Prestasi Akademik

Prestasi akademik seolah kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, yang sesungguhnya prestasi akademik adalah muara (kulminasi) dari berbagai input pendidikan, dan hasil dari proses pendidikan yang berkualitas. Proses pendidikan yang berkualitas merupakan perpaduan dari guru dan tenaga kependidikan yang kompeten, metode yang tepat, serta sarana dan prasarana yang memadai. Dalam prosesnya,

pendidikan harus mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait, terutama dari masyarakat pendukungnya, sebab pendidikan di sekolah diadakan merupakan perwujudan dari pemenuhan atas kebutuhan masyarakat untuk menciptakan agar anak-anak mereka menjadi lebih berbudaya ketika mereka keluar dari sistem pendidikan persekolahan, dan budaya masyarakat pada masa yang akan datang menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi masa lalu dan kini.

b. Peningkatan Prestasi Non-Akademik

Setali tiga uang dengan prestasi akademik, prestasi non akademik juga digandrungi oleh warga sekolah, dijadikan sebagai “triger” untuk memacu prestasi sekolah. Dan ketika mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mencapainya, ternyata mereka menunjuk bahwa kambing hitamnya adalah “sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang profesional”. Sehingga sering kita dengar keluhan, bagaimana mungkin sekolah ini akan mencapai prestasi baik, jumlah gurunya kurang, yang adapun kompetensinya belum sesuai standar, ditambah lagi dengan sarana yang seadanya. Lengkaplah “penderitaan” sekolah atas keterpurukan mutu prestasi akademik dan prestasi non-akademiknya. Jadi, prestasi akademik dan prestasi non-akademik baru akan hadir jadi kenyataan apabila faktor-faktor input pendidikan yang lain sudah dapat dipenuhi, sesuai dengan standarnya, atau bahkan melebihi dari standar yang telah ditetapkan.

c. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pembelajaran

Benar bahwa hampir di semua sekolah memiliki prasarana dan sarana pembelajaran yang kurang memadai, khususnya di Bengkulu. Hanya sekolah-sekolah yang pernah dijuluki sebagai rintisan sekolah bertarap internasional (RSBI) yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Sekolah model ini juga mendapat suntikan dana yang luar biasa, pendidik dan tenaga kependidikan yang rata-rata mumpuni, dan dengan peserta didik yang berasal dari kelas-kelas unggul, belum lagi dilihat dari lokasi sekolah dan sejarah sekolah, yang juga selalu menduduki peringkat teratas dalam berbagai poin keberhasilan. Kecuali bekas sekolah RSBI, sekolah-sekolah pada umumnya masih memerlukan sentuhan fisik yang tidak sedikit.

Mulai dari gedung yang kurang, kondisinya yang buruk, hingga membuat pelajar dalam kondisi tidak nyaman untuk belajar dengan fasilitas pembelajaran yang apa adanya.

d. Peningkatan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Hampir tidak ada kepala sekolah yang mempunyai optimisme yang tinggi, bahwa keberhasilan pendidikan amat bergantung pada profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Mereka pada umumnya lebih yakin, bahwa dilatih dan dibina bagaimanapun guru-guru dan tenaga kependidikan yang ada akan tetap seperti sekarang, sepulang pelatihan, mereka akan kembali pada kebiasaan lamanya, seperti rutinitas dulu, merubah diri dan merubah keadaan jadi mustahil dilakukan, sebab ada raja yang titahnya tidak bisa diabaikan, perintahnya harus ditaati, dan upetinya harus ditunaikan. Jika tidak, mutasi siap menanti, dan non-job segera terjadi. Sertifikasi yang pada awalnya dijadikan rujukan agar pendidikan lebih bermutu, mulai dipertanyakan akurasinya, sertifikasi tidak cukup untuk memberikan jaminan bahwa mutu pendidikan akan menjadi lebih baik. Jika betul demikian, darimana lagi kita memulai memperbaiki mutu pendidikan. Semua pihak mesti sepandapat bahwa bagaimanapun caranya, prasarad bagi perbaikan mutu pendidikan mestilah berawal dari peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Sebab ditangan merekalah awalnya perubahan, ditangan mereka pula, masa depan anak bangsa, dan masa depan bangsa akan dihadirkan. Berhasil mereka, maka berhasillah pembangunan, gagal mereka, maka akan gagal pula pembangunan, dan masa depan yang diidamkan hanya akan menjadi angan belaka.

3. Profil Sosial-Ekonomi dan Budaya Masyarakat

a. Penghasilan Keluarga

Lebih dari 50% kepala keluarga yang mengikuti *focus group discussion* berpenghasilan di atas upah minimum regional (UMR), kurang dari 50% kepala keluarga masih berpenghasilan di bawah UMR. Yang mengejutkan adalah bahwa mereka yang berpenghasilan di atas UMR tidak menjamin memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan di bawah UMR. Dan mereka yang berpenghasilan di bawah UMR justru memberikan sumbangan yang lebih berarti bagi dukungannya terhadap program sekolah. Lebih parah lagi, mereka yang berasal dari

kelas sosial yang lebih baik justru banyak menjadi “penghalang” bagi terjadinya partisipasi masyarakat terhadap implementasi program sekolah.

Dalam hal ini, penghasilan dan kelas sosial yang lebih baik tidak serta-merta merupakan potensi bagi terjadinya partisipasi yang lebih baik, tetapi sebaliknya, seringkali kelompok ini menjadi penggerak bagi penolakan akan program-program yang diusulkan oleh pihak sekolah ataupun komite sekolah. Mereka lebih mempercayai janji para politisi dan para calon kepala daerah yang berkampanye bahwa pendidikan itu “gratis” dan BOS sudah cukup memberikan keperluan bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

b. Gotong Royong, Budaya Kerja dan Kekeluargaan

Hampir seluruh peserta *focus group discussion* masih memiliki dan menjalankan kebiasaan untuk bergotong royong, walaupun dalam kadar dan frekuensi yang berbeda-beda, baik atas inisiatif sendiri maupun karena ikut-ikutan atau menghargai orang yang mengajaknya. Gotong royong dalam kerja-kerja kekeluargaan yang lebih beraroma saling membantu dan bergiliran, yang didasari oleh rasa kebersamaan dan kekeluargaan, lebih inten adanya. Dalam keadaan yang “sempit” sekalipun mereka akan berupaya untuk membantu sanak-keluarga yang sedang memiliki kerja-kerja keluarga seperti membangun rumah, pesta pernikahan, khitanan, atau jenis syukuran lainnya, termasuk ketika keluarga dirundung “kemalangan. Mereka pasti bahu-membahu, meringankan beban anggota keluarga. Dalam banyak kasus, keluarga yang menyelenggarakan pesta pernikahan, kadang kelebihan hewan potong (ayam) dan beras, karena tetangga dan sanak saudara masing-masing membawa hantaran untuk membantu keluarga yang memiliki hajat. Setelah selesai acara, ada beberapa keluarga yang menjual kembali ayam dan beras hantaran.

Dalam hal budaya kerja peserta *focus group discussion* cenderung dapat dibedakan dmenjadi 4 kelompok budaya kerja, yaitu (1) kelompok pendatang yang memiliki etos kerja yan tinggi, rajin, dan ulet; (2) kelompok etnis setempat yang mau beradaptasi dengan pendatang, rajin dan ulet; (3) kelompok ketiga adalah kaum pendatang yang rendah etos kerjanya, tidak rajin dan kurang ulet; sedangkan pada kelompok keempat adalah warga setempat (trans-lokal) yang tidak adaptif, kurang rajin, dan cenderung malas. Golongan yang keempat ini adalah mereka yang terbiasa

berantung pada alam, dan merasa cukup dengan apa yang sudah disediakan oleh alam, seperti buah yang tumbuh di kebunnya tanpa harus menanam, ikan yang ada di sungai-sungan atau di lautan yang berdekatan dengan lingkungan hidup mereka.

c. Daya Dukung Masyarakat terhadap Implementasi Program Sekolah

Keempat kelompok budaya kerja, etnik, dan karakteristik peserta *focus group discussion* turut mewarnai intensitas, besaran, dan kemudahan dalam memberikan bantuan (partisipasi) yang diberikan terhadap sistem sekolah. Kelompok pertama, adalah keompok yang tingkat kesadarannya tinggi terhadap kebutuhan pendidikan anak mereka di sekolah. Kelompok ini sangat kondusif untuk mendukung berbagai program kegiatan di sekolah, bahkan program sekolah yang diusulkan, seringkali merupakan usulan atas inisiatif kelompok ini, mereka berpendapat bahwa pendidikan itu penting, dan tidak ada pendidikan yang gratis. Makin gratis biaya sekolah maka makin kurang mendapatkan kepe

4. Best-Practices Model Partisipasi Masyarakat

Pengalaman adalah guru terbaik dalam kehidupan, mereka yang dapat mengambil pelajaran dari pengalaman adalah orang-orang yang beruntung. Tidak mesti pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengalaman orang lain. Oleh karena itu, melakukan studi banding (*bench marking*) untuk mempelajari keberhasilan orang lain merupakan suatu cara terbaik untuk mendapatkan pengalaman berharga. Jika memungkinkan, adopsilah pengalaman berharga itu, jika perlu adakan modifikasi dan adaptasi agar pengalaman orang lain, yang terjadi di tempat lain bisa diterapkan untuk kondisi dimana kita berada. Kegagalan sekalipun dalam konteks pengalaman merupakan pelajaran berharga, banyak orang yang bangkit karena mereka telah mengalami banyak kegagalan, dan tak ada orang maju yang tak pernah gagal.

b. Studi Banding

Kata studi banding banyak digunakan oleh para praktisi dan birokrat untuk mengtahui apa yang telah dilakukan orang lain dan telah memiliki bukti keberhasilan dalam suatu bidang, untuk kemudian dapat diamalkan di lembaga tempat pelaku studi. Dalam bahasa manajemen, yang dimaksud dengan studi banding sama dengan “*benchmarking*”. Pertanyaan yang harus dijawab oleh pelaku studi banding adalah “kenapa

orang lain atau organisasi lain dapat melakukan sesuatu, kenapa kita tidak, apa keunggulan mereka, dan dimana kelemahan kita. Setelah itu, tembukkan suatu keyakinan kalau orang lain bisa, maka kita juga harus bisa. Dalam kaitan dengan pengalaman banyak sekolah yang berhasil menghimpun partisipasi masyarakat guna memajukan sekolahnya, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk melakukan hal yang sama, atau yang lebih berhasil dari pengalaman sebelumnya.

c. Adopsi

Mengadopsi keberhasilan pihak lain merupakan suatu cara untuk mengulang keberhasilan yang telah dialami orang lain untuk dapat memperoleh kinerja terbaik mereka. Adopsi dalam makna menerapkan atau melaksanakan apa yang telah dilaksanakan atau diterapkan oleh orang lain. Penerapan sesuatu yang diadopsi dengan cara dan pendekatan yang sama, dan dalam suasana yang sama.

d. Adaptasi

Mengadaptasi adalah melakukan sesuatu yang telah dilakukan orang lain, ditempat lain, dengan cara yang tidak selalu sama, tetapi telah disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Mengadaptasi bisa jadi menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna dibanding sebelumnya. Adaptasi juga memiliki konotasi bahwa apa yang dilakukan hari ini semestinya tidak sama dengan apa yang dilakukan kemarin.

C. Prosedur Operasional Standar Penguatan Pelibatan Partisipasi Masyarakat

Prosedur Operasional Standar Penguatan Pelibatan Partisipasi Masyarakat (POSP3M) dimaknai sebagai suatu petunjuk operasional dalam melaksanakan kegiatan penguatan pelibatan partisipasi masyarakat. Petunjuk ini disusun berdasarkan hasil pengamatan terhadap situasi dan kondisi sekolah, berbagai pengalaman terbaik yang ditemukan dalam proses penelitian, baik yang diperoleh melalui *focus group discussion*, maupun berdasarkan laporan dari sekolah-sekolah mitra peneliti. Beberapa langkah prosedur operasi standar yang penulis ajukan antara lain meliputi: (1) peningkatan kapasitas kepala sekolah dan staf; (2) perumusan kembali renstra sekolah; (3) review dan revisi rencana kerja 4 tahunan; (4) review dan revisi rencana kerja sekolah; (5) pemaparan program prioritas dan rasionalnya; (6) peningkatan kapasitas komite sekolah; (7) memproyeksikan dukungan komite sekolah terhadap implementasi program

sekolah; (8) membahas program pemberian bantuan komite sekolah; (9) mengelola bantuan masyarakat hingga sukses.

a. Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Staf

Peningkatan kapasitas kepala sekolah dan staf dalam kontek pelibatan partisi masyarakat adalah penguatan kapasitas dalam: (1) menterjemahkan kebijakan pemerintah dan implementasi dari berbagai peraturan yang mengikat tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan; (2) menyerap aspirasi masyarakat dan memformulasikannya menjadi program sekolah yang aspiratif dan akomodatif; (3) menggali potensi masyarakat guna mendukung terjadinya proses pembelajaran yang bermakna, efisien, efektif, dan produktif; (4) kemampuan dalam mengendalikan, memantau, dan menilai keberhasilan implementasi program; serta (5) menunjukkan bukti bahwa apa yang dihasilkan pada fase akhir proses pendidikan sesuai dengan harapan masyarakat, atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat. Dengan perkataan lain, peningkatan kapasitas kepala sekolah dan staf adalah peningkatan kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan menilai proses pendidikan sejak siswa diseleksi, direkrut, ditempatkan, dilatih, diajar, dibina, dan dinilai, hingga mereka menjadi lulusan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

b. Perumusan Kembali Renstra Sekolah

Kemampuan untuk merumuskan kembali rencana strategis sekolah sebenarnya merupakan bagian dari peningkatan kapasitas bagian (a) di atas. Namun dalam hal ini peneliti memandang bahwa pada beberapa sekolah kasus renstranya tidak sesuai dengan kondisi dan daya dukung yang ada. Setelah ditelisik lebih jauh, ternyata beberapa kepala sekolah dan warga sekolah mengadopsi dalam makna “mencontoh” renstra yang dibuat oleh sekolah lain, mereka merasa sepandapat dengan pernyataan renstra sekolah lain dan mereka menggunakan dengan mengubah nama sekolah asal menjadi sekolahnya. Proses ini juga terjadi pada ketika mereka menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Tuntunan atau penguatan dalam merevisi renstra dapat dilakukan guna menjadikan sekolah-sekolah memiliki arah yang jelas untuk pengembangan jangka panjangnya.

c. Review dan Revisi Rencana Kerja 4 Tahunan dan RKS Tahun Berjalan

Sebagai dampak adanya revisi renstra adalah perlu dilakukan peninjauan kembali (review) dan penyesuaian visi (revisi) terhadap rencana kerja 4 tahunan sekolah. revisi rencana kerja 4 tahunan sebenarnya bukan hanya karena adanya revisi renstra, tetapi juga konsekwensi dari adanya pencapaian atas hasil kegiatan tahunan. Atas rencana kerja 4 tahunan tersebut perlu diadakan peninjauan ulang pada tiap awal tahun, guna melihat mana program yang sudah tercapai dan mana program yang belum tercapai, serta memberikan penguatan pada apa yang mesti diprioritaskan untuk digarap pada tahun berjalan. Apakah rencana kerja tahun berjalan masih cukup relevan dengan kondisi terkini atau ada yang perlu dipertajam, diundur, atau bahkan ditiadakan.

d. Pemaparan Program Prioritas dan Rasionalnya

Kemampuan kepala sekolah dan komite sekolah untuk memaparkan program prioritas dan rasionalnya merupakan prasarat bagi diterimanya program prioritas yang telah disepakati. Para kepala sekolah dan komite sekolah harus dapat meyakinkan orang tua murid bahwa apa yang mereka usulkan merupakan perwujudan dari harapan masyarakat dan warga yang ada di sekitar sekolah. Kepahaman kepala sekolah dan komite sekolah tentang program prioritas akan mempermudah orang tua murid menerima pemberitahuan yang memadai. Kapasitas kepala sekolah dalam memaparkan program dapat mempengaruhi penerimaan atas usulan yang disampaikan dan mengubahnya menjadi program prioritas.

e. Peningkatan Kapasitas Komite Sekolah

Komite sekolah yang berhasil adalah komite sekolah yang dapat mendukung program sekolah sehingga semua kegiatan sekolah jadi efisien dan efektif dalam mencapai tujuan akhir. Komite sekolah yang akan menjadi motor penggerak orang tua murid, guna mensukseskan implementasi program pendidikan. Kompleksitas masyarakat menuntut adanya partisipasi aktif dari berbagai fihak stake-holder pendidikan persekolahan. Oleh karena itu, penting diadakan upaya peningkatan kapasitas komite sekolah.

f. Dukungan Komite Sekolah terhadap Implementasi Program Sekolah

Komite sekolah harus sanggup mendukung implementasi program sekolah di sekolah masing-masing. Tanpa dukungan komite sekolah tak banyak artinya upaya peningkatan mutu pendidikan persekolahan. Dukungan dapat diwujudkan dalam bentuk membantu penyediaan tenaga, dana, dan fasilitas guna terselenggaranya proses pendidikan yang bermakna.

g. Membahas Program Pemberian Bantuan Komite Sekolah

Dukungan komite sekolah terhadap implementasi program sekolah juga mesti ditindak-lanjuti dengan pembahasan program penghimpunan bantuan dan pengelolaan bantuan hingga tujuan semula tercapai secara efektif dan efisien.

h. Mengelola Bantuan Hingga Sukses

Pengelolaan bantuan dimulai dengan **merencanakan** kebutuhan akan barang atau jasa yang diperlukan, perencanaan terkait dengan butuh apa saja, berapa banyaknya, bagai-mana memperolehnya, berapa banyak uang yang ada, dan bagaimana membelanjakannya. Selesai tahap perencanaan, bantuan **dikelola** sebagaimana mestinya, serta dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kemudian **pantau, awasi, dan evaluasi** implementasi program. Sebagai prasarat bagi penelitian lanjutan, pada bab V secara khusus disajikan rencana kerja atau proposal penelitian lanjutan.

BAB 5

PENGUATAN KAPASITAS KOMITE SEKOLAH

DAN PENINGKATAN PELIBATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP

PERBAIKAN KUALITAS INPUT, PROSES, DAN HASIL PENDIDIKAN

DI PROPINSI BENGKULU

(PROPOSAL PENELITIAN TAHUN KEDUA)

A. Rasional

Pada tahun pertama peneliti telah berhasil “memotret” kondisi internal persekolahan (profil sekolah) yang kondisinya bervariasi, kelengkapan dan kesesuaian dokumen sekolah yang juga bervariasi, potensi internal dan eksternal sekolah juga bervariasi adanya. Oleh sebab itu, penggunaan konsep manajemen berbasis sekolah diharapkan mampu menjawab tantangan realitas sekolah yang bervariasi tersebut. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa peranan komite sekolah dewasa ini sangat rendah, partisipasi masyarakat terhadap keterlaksanaan program sekolah sangat rendah, yang diakibatkan oleh adanya penyaluran bantuan operasional sekolah serta janji politik para calon kepala daerah dan calon anggota dewan yang “selalu” menyatakan bahwa jika terpilih nantinya pendidikan akan dijamin “gratis”. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat sosial ekonomi yang lebih baik tidak menjamin atau tidak sejalan dengan tingginya partisipasi mereka terhadap implementasi program pendidikan. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud melaksanakan penguatan kapasitas komite sekolah dan peningkatan pelibatan partisipasi masyarakat terhadap perbaikan kualitas input, proses, dan hasil pendidikan di Propinsi Bengkulu.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Uraianya langsung merujuk pada uraian bab IV laporan penelitian ini. Peneliti tidak perlu menuliskan kembali hasil tersebut karena akan terjadi penulisan pengulangan. Namun demikian, secara ringkas akan disajikan penerapan prosedur operasional standar penguatan pelibatan partisipasi masyarakat (POSP3M) yang dimaknai sebagai petunjuk dalam melaksanakan penguatan pelibatan partisipasi masyarakat. Petunjuk ini disusun berdasarkan hasil pengamatan terhadap situasi dan kondisi sekolah, berbagai pengalaman

terbaik yang ditemukan dalam proses penelitian, baik yang diperoleh melalui *focus group discussion*, maupun berdasarkan laporan dari sekolah-sekolah mitra peneliti. Prosedur operasi standar yang penulis ajukan antara lain meliputi: (1) peningkatan kapasitas kepala sekolah; (2) perumusan kembali renstra sekolah; (3) review dan revisi rencana kerja 4 tahunan; (4) review dan revisi rencana kerja sekolah; (5) pemaparan program prioritas dan rasionalnya; (6) peningkatan kapasitas komite sekolah; (7) memproyeksikan dukungan komite sekolah terhadap implementasi program sekolah; (8) membahas program pemberian bantuan komite sekolah; (9) mengelola bantuan masyarakat hingga sukses.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan atas penelitian tahun pertama yang telah berhasil mendeskripsikan dan mencanangkan model manajemen berbasis sekolah yang lebih mengedepankan pelibatan partisipasi masyarakat. Maka penelitian lanjutan tahun kedua bertujuan untuk menerapkan prosedur operasional standar penguatan pelibatan partisipasi masyarakat dengan panduan sebagai berikut:

1. peningkatan kapasitas kepala sekolah agar kepala sekolah sanggup melaksanakan perumusan kembali renstra sekolah, menjauh kembali dan menyesuaikan visi, misi, dan strategi dalam rencana kerja sekolah;
2. merumuskan kembali rencana strategis sekolah;
3. merevisi rencana kerja 4 tahunan;
4. merevisi rencana kerja sekolah (tahunan);
5. mempresentasikan program prioritas penyelenggaraan pendidikan sekolah sasaran;
6. meningkatkan kapasitas komite sekolah dalam pelibatan partisipasi masyarakat dengan teknik *focus group discussion*;
7. memproyeksikan dukungan komite sekolah terhadap implementasi program sekolah;
8. membahas program pemberian bantuan komite sekolah;
9. mengelola bantuan masyarakat hingga sukses.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada penelitian tahun-1 telah berhasil disusun (1) Instrumen Identifikasi Sosial-Ekonomi, dan Budaya Masyarakat; (2) Instrumen Identifikasi Program Unggulan Sekolah; (3) Profil SEB Masyarakat, dan Peluang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sekolah; (4) Program Unggulan Sekolah dan Rancangan Pelibatan Partisipasi Masyarakat; dan (5) Panduan Prosedur Operasi Standar Pelibatan Partisipasi Masyarakat dalam implementasi program sekolah sebagai Model Manajemen Yang Lebih Mengedepankan Pelibatan Partisipasi Masyarakat.

B. Saran.

Sehubungan dengan masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan orang tua murid dan telah tersusunnya Panduan Prosedur Operasional Standar Pelibatan Partisipasi Masyarakat dalam implementasi program sekolah sebagai Model Manajemen Yang Lebih Mengedepankan Pelibatan Partisipasi Masyarakat. Maka penelitian tahap kedua fokus pada implementasi penguatan kapasitas komite sekolah dan peningkatan pelibatan partisipasi masyarakat terhadap perbaikan kualitas input, proses, dan hasil pendidikan di Propinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas (2006). *Petunjuk Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen*. Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pembinaan SMP, Depdiknas, Jakarta.
- Badan Standar Nasional Pendidikan (2006). *Naskah akademik tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah*. Jakarta: Depdiknas
- Bossert (2002). *Becoming a Good Principal: The Forst Years*. Paper Presented at the Annual Meeting of the Midsouth Educational Research Association, Little Rock USA.
- Cohen (1982). *The Principal and Staff Development in the S Cohen, 1982 High School*. New York: Bank Street College in Education.
- Crow & Paterson, (1998). *Improving School Public Relation Through Principal Leadership*. New York: Allyn and Bacon.
- Fullan, MG (2000). *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College, Colombia University.
- Imergart, Glen (1988). *Leadership and Leader Behavior, in Handbook of Research Educational Administration*. London: Longman
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah.
- Leithwood dan Montgomery's (1998). *The Principal First Years: The Mutual Process of Developing Leadership*. *Educational Leadership*, 6 (6) 32-49.
- Manap, (2008), Analisis Kebutuhan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, Laporan Penelitian, Program Magisten Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu.
- Manap, dkk. (2010). Pemetaan Kompetensi Kepala SMP di Propinsi Bengkulu, Laporan Penelitian, Penelitian Kerjasama Antar Lembaga.
- Manap, dkk. (2011). Penguatan Kompetensi Kepala SMP di Propinsi Bengkulu, Laporan Penelitian, Penelitian Kerjasama Antar Lembaga.
- Miftah Thoha, Ph.D. "Desentralisasi Pendidikan", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 017, Tahun Ke-5, Juni 1999.
- Mulyasa (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- NCREL, 1995, *Decentralization: Why, How, and Toward What Ends?* NCREL's Policy Briefs, report 1, 1993 dalam Nuril Huda "Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan dan Permasalahannya", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 017, Tahun Ke-5, Juni 1999.
- Oteng Sutisna (1996). *Administrasi Pendidikan. Petunjuk Praktis untuk Praktek Profesional*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Sandar nasional Pendidikan.